

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Dalam belajar politik dengan metode pendidikan politik bersifat dialogis, terbuka, rasional atau penyadaran. Di sekolah, lewat PKn arahnya yaitu pada menumbuhkan '*Good Citizenship*' atau agar anak menjadi efektif bagi bangsanya. Kegiatan yang dilakukan terutama terletak pada berpartisipasi memperoleh informasi-informasi politik, misalnya membaca buku-buku teks, mengikuti perkembangan lewat media massa elektronik dan non-elektronik, dll.

Pendidikan politik jelas berbeda dengan indoktrinasi politik, yang merupakan belajar politik yang bersifat monolog bukan dialog, lebih mengutamakan pembangkitan emosi, dan lebih merupakan pengarahan politik untuk dukungan kekuatan politik (mobilisasi politik) dari pada meningkatkan partisipasi politik. Indoktrinasi politik ini pada umumnya dilakukan oleh rezim otoriter atau totaliter untuk mempertahankan status-quo, partai politik juga pada umumnya lebih banyak menggunakan indoktrinasi politik dari pada pendidikan politik (Cholisin, 2000: 6).

Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa sebagai upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan

mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik (Kartini K, 2009: 64).

Pendidikan politik merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang terus menerus berproses di dalam person, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi-kondisi lingkungan sekitarnya (Kartini K, 2009: 65).

Dapat diartikan bahwa pada dasarnya pendidikan politik memiliki tujuan mendidik dan mengatur diri sendiri untuk dapat berproses menjadi manusia dewasa dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan-tujuan politik dan telah memikirkan resiko yang akan didapat dari apa yang telah dilakukan.

Di sekolah, anak banyak belajar pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku politik secara eksplisit, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Melalui mata pelajaran PKn, anak diajarkan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sistem politik, otonomi daerah, partai politik, budaya politik, dsb. Melalui pelajaran ini, anak diharapkan pada gilirannya dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan negaranya.

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan politik maupun politik pendidikan itu sendiri, maka kedudukan pendidikan politik sangatlah strategis. Affandi (1996:25) menyatakan pendidikan politik '*political education*' sering kali menggunakan berbagai peristilahan lain

seperti '*political socialization* dan *citizenship training*'. Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dalam perspektif ini, pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasinya dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya.

Affandi (1996:27) menyatakan bahwa pendidikan politik dianggap penting oleh hampir semua masyarakat dan dianggap sebagai penentu perilaku politik seseorang. Penilaian ini didasarkan pada maksud pendidikan politik sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik dan meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui akulturasi informal maupun melalui pendidikan politik yang direncanakan untuk menunjang stabilitas sistem politik. Brownhill dan Smart (1989), menarik sebuah proposisi bahwa pendidikan politik adalah proses pendidikan untuk membina siswa agar mampu memahami, menilai, dan mengambil keputusan tentang berbagai permasalahan dengan cara-cara yang tepat dan rasional, termasuk dalam menghadapi masalah yang *bias* maupun isu yang *controversial*.

Pengetahuan politik akan membawa orang pada tingkat partisipasi tertentu. Dalam politik seseorang tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan juga harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan. Perpaduan ketiga aspek tersebut menurut Crick & Porter

dalam Affandi (1996:27), disebut melek politik "*political literacy*". Dari aspek pengetahuan seseorang dikatakan melek politik apabila sekurang-kurangnya menguasai tentang: (1) informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja; (2) bagaimana melibatkan diri secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan; (3) kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana cara memutuskan sebuah isu; (4) kemampuan mengenal tujuan kebijakan secara baik yang dapat dicapai ketika isu (masalah) telah terpecahkan; (5) kemampuan memahami pandangan orang lain dan membenarkan mereka tentang tindakannya dan membenaran tindakan dirinya sendiri. Kemampuan tadi tentu saja berbeda pada setiap orang bergantung pada tingkat melek politiknya.

Dari aspek keterampilan (skills) seseorang dikatakan melek politik jika ia tidak hanya berperan sebagai penonton yang baik, tetapi mereka mampu berpartisipasi aktif atau bahkan menolak secara positif. Seseorang yang melek politik pun memiliki toleransi terhadap pandangan orang lain dan dapat memikirkan perubahan dan bagaimana metode yang tepat untuk menguasainya. Alfian menganalisis keberhasilan pendidikan politik ditinjau dari dua dimensi. Dimensi pertama berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan. Dimensi kedua, ialah realitas atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung diperbandingkan dengan tuntutan-tuntutan sistem politik ideal tadi.

Keberhasilan pendidikan politik tentunya akan melahirkan masyarakat yang melek politik (*political literacy*) dan masyarakat yang melek politik akan mampu berpartisipasi secara berkualitas. Untuk berhasilnya politik pendidikan maka pemerintah seyogyanya melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik disini bukan harus dimaknai oleh pembelajaran dipersekolahan saja melainkan juga dapat dilakukan melalui proses sosialisasi politik. Sosialisasi politik haruslah dilakukan secara lebih luas yaitu melibatkan lebih banyak orang dan dilaksanakan secara dialogis-interaktif bukan indoktrinatif.

Pengertian pendidikan politik yang lain dikemukakan oleh Alfian, 1986: 235 (dalam Sumantri, 2003: 3), adalah “Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun”.

Pengajaran merupakan sesuatu yang menyangkut pemberian informasi dan keahlian (keterampilan). Para pendidik politik harus menentukan berbagai pengetahuan yang sesuai bagi pendidikan politik dan berbagai macam keahlian yang diperlukan untuk diberikan sebagai pegangan jika seorang peserta didik diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara sukses dalam politik. politik bukan hanya menyangkut tentang kekuatan saja, tetapi juga menyangkut tentang nilai-nilai, bukan hanya

dalam meraih beberapa tujuan nilai tertentu tapi juga dalam meraihnya dengan cara menghormati martabat manusia.

Bagi para pendidik politik, salah satu cara dalam mengambil keputusan yaitu dengan menganggap bahwa pengetahuan yang mendidik seseorang secara politik dibutuhkan untuk meraih kesempatan dalam melaksanakannya dengan penuh keberhasilan dalam sebuah konteks politik. pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan seseorang dalam suatu organisasi agar dapat meraih suatu kesempatan sukses. Seseorang yang juga perlu dilibatkan dalam politik-politik (politik konsensus) dari politik konflik dan terkadang ahli dalam menggerakkan orang dalam direksi-direksi tertentu, dalam hal ini disebut sebagai individu yang melek politik (Brownhill, 1989).

Kita membutuhkan pengetahuan tidak hanya tentang organisasi tapi juga tentang bagaimana untuk mendapatkan sesuatu. Pengetahuan yang mendetail akan sangat berbeda dari satu organisasi ke organisasi yang lain dan akan berubah seiring periode waktu. Hal ini juga tergantung apakah kita termasuk di dalam organisasi atau berada di luarnya, dan jika kita berada di dalamnya maka posisi kita berada dalam lembaga yang bersifat hirarki pada organisasi tersebut. Hal pertama yang harus kita ketahui atau kita kenali dan pahami, adalah posisi kita sendiri dalam suatu hubungan dengan orang lain atau organisasi yang ingin kita pengaruhi. Kita juga perlu mengetahui struktur manajemen formal organisasi yang sama halnya dengan struktur otoritas informal. Sebuah organisasi harus

memiliki sumber agar tetap hidup. Sumber-sumber organisasi yaitu segala sesuatu seperti pembiayaan, pembangunan, dan fasilitas-fasilitas umum yang berguna. Sumber-sumber yang tersedia tersebut harus dapat didistribusikan dalam organisasi. Jadi, kita perlu mengetahui atas dasar apa (kebutuhan, persamaan, efektivitas, dll). Sehingga distribusi itu dibuat, kemungkinan alternatif, dan argumen yang mendukungnya. Kita juga memerlukan tidak hanya informasi faktual, tapi juga pemahaman tentang perselisihan yang muncul atau sepertinya akan muncul, isu-isu politik yang mungkin relevan bagi pembuatan keputusan politik, argumen yang mungkin digunakan dalam perselisihan atau dengan referensi dari isu-isu tertentu (Brownhill, 1989).

Melek politik seharusnya memiliki sebuah pemahaman dalam dasar konsep politik, seperti konflik, pembuatan keputusan, peraturan-peraturan, persetujuan / penolakan, dan pengetahuan tentang dimana untuk mendapatkan informasi yang mereka belum mengetahuinya (misalnya siapa yang didekati, organisasi mana yang harus dihubungi, dimana informasi faktual itu berada).

Kurikulum pendidikan politik oleh Robert Brownhill terdapat pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebuah dasar etika harus dibangun, yang termasuk juga menghormati yang lain, toleransi, dan suatu pemahaman terhadap prinsip memperlakukan orang lain kepada diri sendiri.

2. Sebuah pertimbangan tentang bagaimana peraturan dapat diganti, dan tentang bagaimana menyelesaikan masalah pada umumnya. Pada bagian ini, kelompok memperhatikan hal-hal di bawah ini.
 - a. Sifat dari argumen rasional: argumen deduktif dan induktif, bentuk dialektika dari argumen politik.
 - b. Argumen persuasif: menggunakan istilah emosi, definisi persuasif, mempergunakan bukti dengan baik, pemikiran keliru yang logis, dan retorik.
 - c. Tekanan: menggunakan ancaman, penawaran, argumen tentang kemanfaatan, pembentukan kepentingan kelompok, tekanan hirarki (bagaimana untuk menggunakan hirarki dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk meletakkan tekanan pada anggota tertentu dari organisasi tersebut).
 - d. Keahlian politik secara umum: kampanye organisasi, bagaimana untuk mendapatkan dukungan, bagaimana untuk melatih dan membangun pengaruh, kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman akan fungsi dan pemimpin pertemuan.
 - e. Keahlian berkomunikasi: mempresentasikan argumen secara lisan dan tulisan, berpidato, seni dalam berdebat, tehnik persuasif.

3. Sifat peraturan dan otoritas
 - a. Keperluan akan aturan
 - b. Hubungan aturan kekuasaan dan otoritas
 - c. Ide dari aturan legitimasi dan otoritas, otoritas *de facto* dan *de jure*
 - d. Perbedaan jenis peraturan, misalnya peraturan pertama dan kedua dari H.L.A. Hart
 - e. Bagaimana untuk merubah peraturan.
4. Konsep otoritas obligasi dan legitimasi
 - a. Hubungan moralitas dan hukum
 - b. Nurani individu dan konsep otoritas yang berkuasa.
5. Suatu pemahaman dari beberapa konsep dasar politik, misalnya kebebasan, kesetaraan, keadilan, kekuasaan hukum, dan beberapa argumen yang berhubungan dengan konsep ini.
6. Suatu pemahaman tentang struktur dasar dari pemerintahan pusat dan daerah.
7. Beberapa pemahaman dari berjalannya ekonomi nasional dan internasional.
8. Beberapa pengetahuan tentang Negara Inggris baru-baru ini dan sejarah internasional.
9. Menganalisis sendiri (Brownhill, 1989).

Sedangkan menurut Inpres No. 12 Tahun 1982, "Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan

kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien”.

Dengan demikian, pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinyu dari satu generasi ke generasi berikutnya sesuai dengan perkembangan sistem politik dalam rangka membangun watak kewarganegaraan (*national character building*).

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Politik

Jika melihat maksud pendidikan politik di atas, tidaklah salah apabila pendidikan politik diberikan kepada generasi muda sebagai bagian dari pembinaan generasi muda Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang demokratis di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan para generasi muda mampu berperan dalam kehidupan bangsa dan bernegara secara tangguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan tujuan pendidikan politik adalah sebagai berikut:

Untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun

1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat sebagai berikut:

- 1) Sadar akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara.
- 2) Sadar dan taat pada hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan objektif bangsa saat ini.
- 4) Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
- 5) Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.
- 6) Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan bangsa dan bernegara khususnya dalam usaha pembangunan nasional.
- 7) Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
- 8) Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi, dan seimbang.
- 9) Mampu melakukan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari ideologi lain di luar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atas dasar pola pikir dan penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam hal ini, pendidikan politik di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Peningkatan pemahaman akan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu meningkatkan partisipasi secara aktif untuk membangun bangsa sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa. Pandangan di atas, sejalan dengan Sumantri dan Affandi (1996:126), yang menyatakan bahwa:

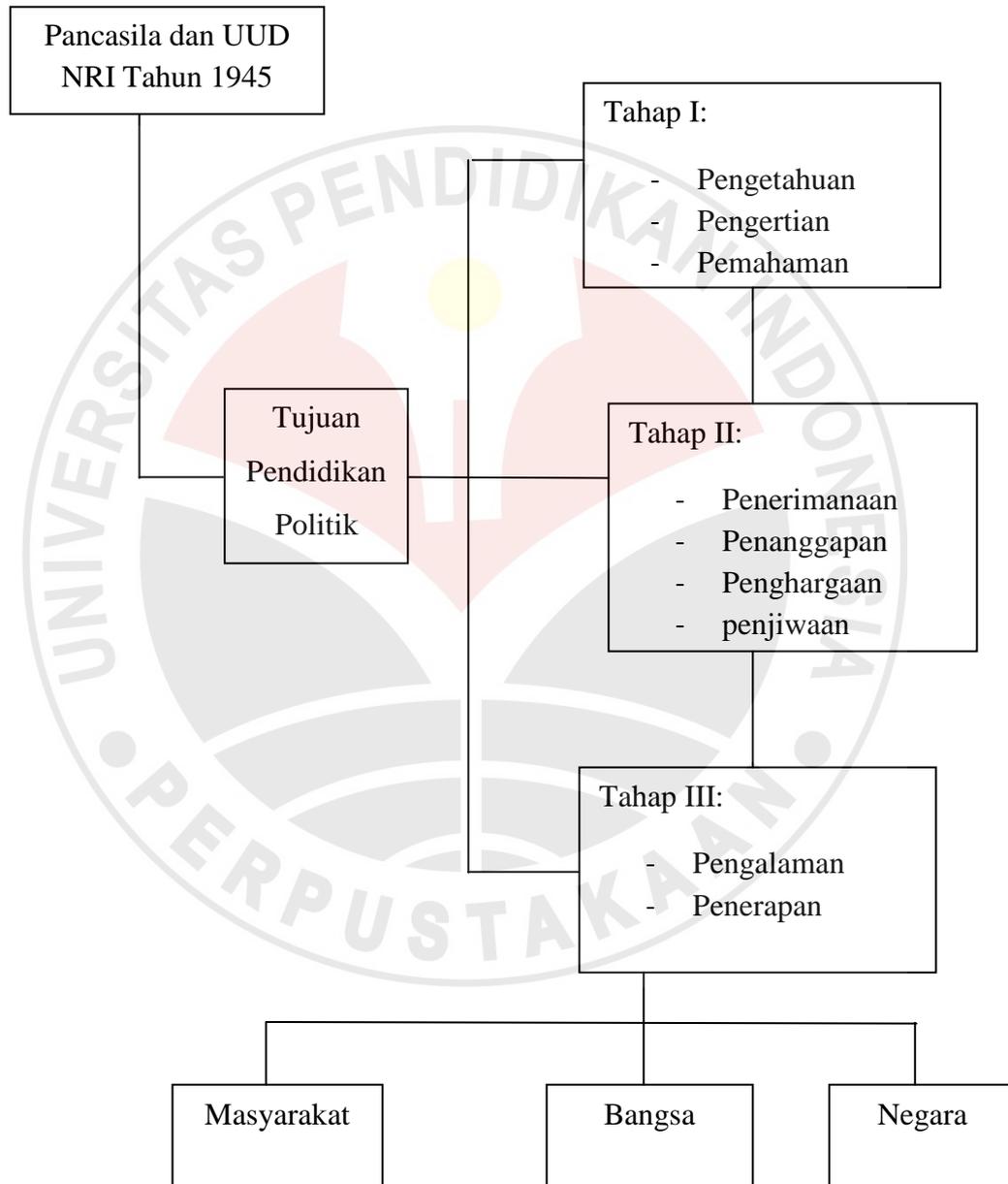
Maksud diselenggarakan pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia.

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara (Sumantri, 2003: 3).

Hal ini berarti melalui kegiatan pendidikan politik diharapkan terbentuk warga negara yang berkepribadian utuh, berketerampilan, sekaligus juga berkesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki rasa tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang.

Dalam meninjau kerangka kerja suatu eksistensi pelaku politik, kita tidak harus mengikuti perkembangan negara idaman yang tak dapat dicapai, melainkan kita harus merumuskan suatu versi ideal yang sesungguhnya melalui cara yang lebih abstrak. Pendidikan politik terbatas untuk memberikan tinjauan yang berkelanjutan mengenai institusi dan kehidupan sehari-hari. Meninjau kependidikan itu sendiri mengingatkan atas apa yang kita harapkan untuk tercapai, yang juga menekankan pada pendekatan moral (Brownhill, 1989: IV).

Tahapan-tahapan kemajuan yang dapat dicapai melalui pendidikan politik dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tujuan pendidikan politik serta tahapan pencapaian tujuan yang diharapkan. (disarikan berdasarkan tahapan pendidikan politik yang terdapat dalam Inpres No. 12 Tahun 1982).

Tahapan pertama, merupakan tahapan yang paling rendah dan lebih mudah untuk dicapai, yaitu dengan memiliki sejumlah pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik. Dalam istilah lain sering dinamakan *cognitif morality*.

Tahap kedua, berhubungan dengan masalah sikap (afektif). Pada tahap ini memerlukan lebih banyak usaha dan pematangan. Sedangkan tahap terakhir berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan yang dilakukan setelah orang tersebut mendapatkan pendidikan politik.

Kemajuan dan keberhasilan pendidikan politik hanya dapat dilihat dari perubahan sikap dan tingkah laku generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemajuan ini terlihat dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan kedewasaan politik yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, misalnya: partisipasi dalam pemilihan umum, keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan atau politik, peran serta aktif dalam pembangunan nasional, dan bentuk-bentuk perilaku lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (Sumantri, 2003: 3).

Kajian materi pendidikan politik Sekolah Menengah Atas adalah mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai toleransi, menghargai, cinta tanah air, kebijaksanaan, pengabdian, persamaan derajat, patriotisme, musyawarah, gotong royong, kasih sayang, kewaspadaan, ketertiban, kesatuan, keramah-tamahan, kesatuan, kedisiplinan, kesetiaan, tanggung jawab, kesatuan dan persatuan, demokrasi pancasila, keadilan dan

kebenaran, ketaatan, pengendalian diri, dan tolong menolong (Sumantri, 2003: 8).

Materi pendidikan politik disampaikan melalui desain pembelajaran, yakni dengan pemahaman, perbaikan, dan penerapan metode-metode pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan proses penentuan metode pembelajaran yang tepat untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam diri siswa yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan isi pembelajaran dan siswa tertentu. Ibarat orang yang akan membuat rumah, desain pembelajaran adalah blueprint yang dibuat oleh seorang arsitek. Blueprint ini menyatakan metode apa yang seharusnya digunakan untuk materi dan siswa tertentu. Desain pembelajaran menuntut pengetahuan tentang berbagai metode pembelajaran, bagaimana memadukan metode-metode yang ada, dan situasi-situasi yang memungkinkan penggunaan metode-metode tersebut secara optimal.

Menurut Wong dan Roulerson (1974) yang mengemukakan 6 langkah pengembangan desain pembelajaran, yaitu:

1. Merumuskan tujuan
2. Menganalisis tujuan tugas belajar
3. Mengelompokkan tugas-tugas belajar dan memilih kondisi belajar yang tepat
4. Memilih metode dan media
5. Mensintesis komponen-komponen pembelajaran
6. Melaksanakan rencana, mengevaluasi dan memberi umpan balik (<http://ftaman.wordpress.com/2010/01/11/pengembangan-desain-pembelajaran/>).

Hal yang senada dengan di atas dikemukakan oleh Degen seperti yang dikutip oleh Muhaimin et.al. bahwa upaya-upaya perbaikan pendidikan dengan berpijak pada asumsi-asumsi desain tertentu, tentang

hakikat perencanaan pembelajaran, yaitu: (1) perbaikan kualitas pembelajaran harus diawali dengan menyusun desain pembelajaran; (2) desain pembelajaran disusun dengan menggunakan pendekatan sistem; (3) desain pembelajaran didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana seseorang belajar; (4) desain pembelajaran diacukan pada peserta didik sebagai individu yang berbeda satu dengan yang lainnya; (5) hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan hasil pengiringa; (6) sasaran akhir desain pembelajaran adalah bagaimana memudahkan peserta didik belajar; (7) desain pembelajaran mencakup semua variabel yang mempengaruhi belajar; dan (8) inti desain pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (<http://www.referensimakalah.com/2012/06/asumsi-penyusunan-desain-pembelajaran.html>).

Dikti, melalui Program Pekerti (Pengembangan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional), yang dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan Pendidikan Tinggi mengembangkan model desain pembelajaran yang dikenal dengan MPI (Model Pengembangan Instruksional), dimana untuk mengembangkan sebuah desain pembelajaran diperlukan 8 langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum (TIU)
2. Melakukan analisis instruksional
3. Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa
4. Menuliskan tujuan instruksional khusus (TIK)
5. Menulis tes acuan patokan
6. Menyusun strategi instruksional
7. Mengembangkan bahan ajar
8. Menyusun desain dan melaksanakan evaluasi formatif

Model Pengembangan Instruksional (MPI) versi Pekerti, 2001 dalam rangka implementasi kurikulum yang sedang berlaku, sejumlah istilah yang menyangkut langkah-langkah tersebut sudah harus disesuaikan dengan perkembangan (trend) yang terjadi. Namun, secara konseptual, sebagai referensi model-model tersebut kiranya sangat bermanfaat untuk dikaji dan diimplementasikan dimana konsep-konsep tertentu masih relevan (<http://ftaman.wordpress.com/2010/01/11/pengembangan-desain-pembelajaran/>).

Generasi muda sebagai pewaris cita-cita bangsa dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam membangun bangsa. Oleh sebab itu, generasi muda harus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan politik sehingga para generasi muda menggunakan pengetahuannya untuk berpolitik secara bertanggung jawab. Pendapat ini sejalan dengan Brownhill (1989:4) yang mengungkapkan bahwa:

The aim of political education should therefore be to develop the professionals interest and to point them toward their political responsibilities, while at the sometime endeavouring to give them the necessary knowledge and skills to carry out those responsibilities.

Tujuan pendidikan politik sebenarnya secara alamiah telah berjalan dan terus berlangsung melalui berbagai interaksi sosial dalam masyarakat yang dikenal sebagai transformasi nilai. Melalui proses transformasi tersebut, manusia akan dapat menilai bahwa sesuatu dianggap baik atau buruk. Namun demikian, walaupun proses penghayatan nilai berlangsung secara alamiah, dalam kenyataannya, akan lebih berhasil apabila dilakukan secara sadar dan berencana melalui proses pendidikan (Sumantri, 2003: 3).

Dengan demikian, pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, memberikan pemahaman mengenai pengetahuan politik sehingga warga negara berpartisipasi dalam sistem politik yang sedang berjalan. Pelaksanaan pendidikan politik harus dilaksanakan secara sistematis untuk menumbuhkan iklim demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedudukan dan pelaksanaan pendidikan politik dikemukakan oleh Affandi (1996:6) sebagai berikut:

Pendidikan politik tidak saja akan menentukan efektivitas sebuah sistem politik karena mampu melibatkan warganya, tetapi juga memberikan corak pada kehidupan bangsa di waktu yang akan datang melalui upaya penerusan nilai-nilai politik yang dianggap relevan dengan pandangan hidup bangsa yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, pendidikan politik memegang peranan yang sangat vital untuk mencapai kehidupan bangsa yang lebih demokratis. Dengan pendidikan politik dibentuk dan dikembangkan warga negara agar memiliki kesadaran politik dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik ditinjau dari sudut proses merupakan upaya pewarisan nilai-nilai budaya bangsa, proses peningkatan dan pengembangan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Pendidikan politik diarahkan untuk menciptakan generasi muda yang melek politik merupakan upaya pembangunan politik masyarakat untuk mengenal, mengetahui dan memahami sistem politik yang berjalan serta nilai-nilai politik tertentu yang akan mempengaruhi perilaku warga negara. Pernyataan tersebut secara eksplisit menggambarkan bahwa pendidikan politik merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan politik. Menurut Affandi, pembangunan politik merupakan proses penataan kehidupan pemerintah yang terus menerus sesuai dengan pertumbuhan sosial politik masyarakat dan tidak dapat dibendung oleh suatu rezim tertentu yang menghendaki kekuasaan absolut. Pendidikan politik sesungguhnya menjadi bagian dalam kehidupan manusia sebab dimana ada manusia maka terdapat pula masyarakat atau dengan kata lain manusia adalah *zoon politicon*. Sehingga ketika terdapat

unsur politik dalam kehidupan manusia maka akan terjadi sosialisasi politik dalam arti longgar dari pendidikan politik, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Pendidikan politik di persekolahan akan menentukan sikap politik setiap individu yang dipengaruhi pula oleh faktor lingkungan serta keakuratan informasi yang diterima dari media cetak atau elektronik. Proses pendidikan politik yang dilakukan secara formal di persekolahan menjadi tahap awal untuk proses indoktrinasi politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Brownhill (1989), bahwa *“Most opposition to the inclusion of political education in the curriculum comes from those who maintain that the teaching of politics in schools would be the first stepping stone to political indoctrination”*.

Pendidikan politik merupakan sesuatu yang prinsip dan pokok dalam menopang pembangunan sistem politik suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan politiknya. Tanpa itu, maka suatu negara akan jauh tertinggal dengan negara lain, bahkan mungkin saja bisa runtuh atau bubar. Upaya untuk menjadikan pendidikan politik sebagai norma bagi kehidupan masyarakat harus diawali oleh adanya kemauan politik (*political will*) pemerintah.

Pendidikan politik salah satu sarana pembinaan warga negara, terutama generasi mudanya dalam rangka mempersiapkan regenerasi menyongsong hari depan bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, fungsi pendidikan politik adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan

memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan warga negara guna menunjang keutuhan negara sebagai budaya bangsa.

Pengembangan yang dilakukan ditempuh melalui pola pendidikan dan interaksi / pelibatan langsung. Adapun media yang digunakan adalah ormas / OKP disamping sekolah. Pembinaan ini dilaksanakan untuk mencapai target: memberikan wawasan berbangsa dan bernegara, membentuk sikap positif, kritis, inovatif, dan demokratis, serta mempersiapkan calon pemimpin bangsa demi masa depan. Kepeloporan generasi muda merupakan potensi internal yang harus digerakkan dan termanifestasi dari serangkaian aktivitas organisasi (Sumantri, 2003: 1).

Dengan demikian, pendidikan politik dalam kerangka pembangunan politik merupakan usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan tatanan politik dan pemasyarakatan sistem politik nasional melalui jalur pendidikan sebagai sarana yang efektif dan tepat untuk meningkatkan taraf kecerdasan rakyat. Di samping itu merupakan proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar ideologi negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, berencana dan berlangsung terus menerus dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*national character building*). Pendidikan politik pada hakikatnya suatu proses pembelajaran yang tidak hanya terbatas kepada apa yang dinamakan pengajaran belaka, akan tetapi merupakan suatu bentuk pendidikan dalam membentuk manusia yang seutuhnya seperti apa yang menjadi essensi pendidikan yang

menjaga nilai-nilai, norma, dan kaidah, baik secara filosofis maupun ideologis serta peradaban dan kebudayaan.

Pendidikan politik merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana guna meningkatkan kesadaran politik warga negara sehingga ia dapat berperan sebagai pelaku dan partisipan dalam kehidupan politik kenegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai politik yang berlaku serta dapat menjalankan peranannya secara aktif, sadar dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai politik yang berdasarkan ideologi nasional. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan akan mampu tercapainya stabilitas nasional yang semakin mantap dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam pengembangan pendidikan politik dapat dilakukan melalui organisasi pemuda. Dalam persekolahan dapat dilakukan melalui OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Di dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 226/C/Kep/0/1993 disebutkan bahwa Organisasi yang ada dalam lingkup pendidikan dasar dan menengah adalah OSIS. Jadi, yang dimaksud dengan OSIS adalah satu-satunya organisasi kesiswaan yang sah di sekolah yang digunakan sebagai sarana pembinaan kesiswaan.

Sebagai sarana pembinaan kesiswaan dan atau generasi muda terutama dalam rangka pendidikan politik, OSIS harus dapat berperan sebagai:

1. Peranan sebagai wadah

OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mencapai pembinaan kesiswaan pada khususnya dan tujuan pembinaan generasi muda pada umumnya. Dalam konteks ini OSIS harus mampu berfungsi sebagai wadah, wahana dan tempat pembinaan kesiswaan lainnya sehingga siswa mampu mengembangkan bakat, kreativitas, serta minat yang dimilikinya.

2. Peranan sebagai penggerak motivator

Motivator merupakan rangsangan atau stimulus yang menyebabkan siswa memiliki keinginan, semangat untuk melakukan kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan yang positif, OSIS akan tampil sebagai penggerak apabila para pembina mampu membawa OSIS untuk selalu dapat menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan yaitu mampu menghadapi perubahan, memiliki daya tangkal terhadap ancaman memanfaatkan peluang dan perubahan serta dapat emberikan kepuasan kepada anggotanya.

3. Peran yang bersifat preventif

Dalam konteks ini peranan OSIS harus dapat menyelesaikan berbagai perilaku menyimpang siswa. Dengan demikian secara

preventif OSIS harus berpartisipasi dalam menanggulangi segala ancaman yang dapat mengganggu ketahanan sekolah (Sumantri, 2003: 7).

B. Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sudjatmiko, 2008: 12). Berdasarkan pendapat di atas jelas bagi kita bahwa PKn bertujuan mengembangkan potensi individu warga negara, dengan demikian maka seorang guru PKn haruslah menjadi guru yang berkualitas dan profesional, sebab jika guru tidak berkualitas tentu tujuan PKn itu sendiri tidak tercapai.

Secara garis besar mata pelajaran Kewarganegaraan memiliki 3 dimensi yaitu :

1. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (Civics Knowledge) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral
2. Dimensi Keterampilan Kewarganegaraan (Civics Skills) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Dimensi Nilai-nilai Kewarganegaraan (Civics Values) mencakup antara lain percaya diri, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur. (Sudjana, 2003: 4)
(<http://www.sekolahdasar.net/2011/09/hakekat-pendidikan-kewarganegaraan-pkn.html#ixzz27dZjPySJ>)

a. **Secara Ontologi**

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara ontologi merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Ciri-ciri dari PKn antara lain:

- 1) Materinya berupa pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara).
- 2) Bersifat interdisipliner.
- 3) Bertujuan bagaimana membentuk warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Kurikulum 2006).

Dari pengertian dan ciri-ciri PKn di atas dapat diartikan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga negara dalam hal terutama membangun bangsa dan negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan

dasar dari pembelajaran PKn dengan materi pokoknya demokrasi politik atau peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting ketika pemerintah menetapkan PKn menjadi salah satu mata pelajaran yang diwajibkan untuk dimuat dalam kurikulum sekolah. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang antara lain mewajibkan isi kurikulum wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang pada prinsipnya bertujuan membentuk *good citizenship* dan menyiapkan warga negara untuk masa depan. Dalam pendidikan formal, proses demokratisasi harus dimulai dari tahap yang paling awal yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik dilakukan melalui agen-agen seperti keluarga, masyarakat, teman sebaya, dan tentunya bisa juga lewat sekolah sebagai lembaga formal. Pendidikan politik lewat sekolah dilakukan melalui mata pelajaran di sekolah dan salah satu yang paling penting adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara

sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa (Hidayat dan Azra, 2008: 5).

Pendidikan adalah suatu proses terprogram untuk mengefektifkan terjadinya perubahan kognitif dan afektif dalam diri seseorang anak Indonesia, sedemikian rupa sehingga si anak akan dapat berfungsi dengan baik di dalam kehidupan masyarakatnya.

Adapun perubahan lewat proses pendidikan yang dimaksudkan adalah perubahan yang tersimak dalam wujud bertambahnya pengetahuan dan kesadaran serta kepekaan seseorang akan hak-haknya yang asasi dan pula hak-hak sesama warga dan/atau sesama manusia yang ditemui dalam kehidupan ini.

Pendidikan Kewarganegaraan (*civics*), yang berhakikat juga sebagai pendidikan untuk mengenali dan menghayati hak-hak warga negara yang asasi (*civil right*) diacarakan dengan harapan agar setiap peserta didik pada akhirnya dapat menyadari hak-haknya yang asasi, yang perlindungannya dijamin oleh undang-undang negara.

b. Secara Epistemologi

Pendidikan kewarganegaraan secara epistemologi mengandung pengertian sebagai *citizenship education*, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sampai saat ini bidang itu sudah menjadi bagian inheren

dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia dalam lima status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya digunakan dalam pengertian yang luas seperti "*citizenship education*" atau "*education for citizenship*" yang mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah dan dalam program pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Di samping itu, juga konsep pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai nama suatu bidang kajian ilmiah yang melandasi dan

sekaligus menaungi pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) atau *Civics* memiliki banyak pengertian dan istilah. Tidak jauh berbeda dengan pengertian ini, menurut Muhammad Somantri (dalam Komaruddin H dan Azyumardi Azra) pengertian *Civics* sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan : (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik), (b) individu-individu dengan negara. Edmonson. 1958 (dalam Hidayat dan Azra) menyatakan bahwa makna *Civics* selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak-hak istimewa warga negara. Pengertian ini menunjukkan bahwa *Civics* merupakan cabang dari ilmu politik, sebagaimana tertuang dalam *Dicitionary of Education*. Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan *Civics* adalah *citizenship*. Dalam hubungan ini Stanley E. Dimond, seperti dikutip Somantri (dalam Komaruddin H dan Azyumardi Azra), menjelaskan rumusan sebagai berikut: “*Citizenship* sebagaimana keberhubungan dengan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, *citizenship* hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak-hak hukum dan tanggung jawab”. Dari perspektif ini, *Civics* dan

Citizenship erat kaitannya dengan urusan warga negara dan negara (Hidayat dan Azra, 2008: 5).

Istilah *Civic Education* oleh banyak ahli diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewargaan. Penggunaan nama Pendidikan Kewargaan tidak lepas dari realitas empiris bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Lebih dari sekedar Pendidikan Kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan demokrasi, Pendidikan Kewargaan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan guru dan siswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Hal ini menjadi titik tekan Pendidikan Kewargaan ini adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia (*global society*) (Hidayat dan Azra, 2008: 6).

c. Secara Aksiologi

Pendidikan Kewarganegaraan secara aksiologi dapat dilihat pada keputusan DIRJEN DIKTI NO.43/DIKTI/Kep/2006, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi misi dan kompetensi /manfaat sebagai berikut:

Visi Pendidikan Kewarganegaraan diperguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan

penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan warga negara memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religious, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta terhadap tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu warga negara memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa bertanggung jawab dan bermoral. Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta terhadap tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kompetensi mahasiswa dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangsa.

Menurut *National Council of Social Studies (NCSS) AS*, PKn adalah proses yang meliputi semua pengaruh positif yang dimaksudkan untuk membentuk pandangan seorang warga negara dalam peranannya dalam masyarakat. PKn adalah lebih dari pada sekedar bidang studi. PKn mengambil bagian dari pengaruh positif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melalui PKn, generasi muda dibantu untuk memahami cita-cita nasional, hal-hal yang baik diakui oleh umum, proses pemerintahan sendiri, dan dibantu untuk memahami arti kemerdekaan untuk mereka dan untuk semua manusia dan untuk individu dan kelompok, dalam bidang kepercayaan, perdagangan, pemilu, atau dalam tingkah laku sehari-hari. Mereka juga dibantu untuk memahami bermacam-macam hak kemerdekaan warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya dan tanggung jawab atas apa yang telah dicapainya (Cholisin. 2004: 7).

Menurut Somantri, Pendidikan Kewarganegaraan ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

- a) *Civic Education* adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah,
- b) *Civic Education* meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis,
- c) Dalam *Civic Education* termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara (Hidayat dan Azra, 2008: 7).

Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen *Civic Education* di atas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, serta humanis dalam lingkungan yang demokratis. Unsur-unsur substantif *Civic Education* tersebut terangkum dalam tiga komponen inti yang saling terkait dalam Pendidikan Kewarganegaraan ini, yakni Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Hidayat dan Azra, 2008: 7).

Dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Hal ini menjadi titik tekan Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis,

demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia.

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru (*New Indonesian Civic Education*). Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran.

Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Kedudukan warga negara yang ditempatkan pada posisi yang lemah dan pasif, seperti pada masa-masa lalu harus diubah pada posisi yang kuat dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis semestinya tidak bersifat *top down*, melainkan lebih bersifat *bottom up*. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang baik dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di kalangan warga negara, ini dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Sunarso dkk. 2004: 3-4).

Pada kurikulum 2006 (KTSP), kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (dalam Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang Standar Isi).

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi dasar, atau sering disebut kompetensi minimal, yang akan ditransformasikan dan ditransmisikan pada peserta didik terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- 1) Kompetensi pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*), yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani.
- 2) Kompetensi keterampilan kewargaan (*civic skills*), yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewargaan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses

pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

- 3) Kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM (Hidayat dan Azra, 2008: 8-9).

Ketiga kompetensi tersebut bertujuan membangun pembelajaran (*learning building*) Pendidikan Kewargaan ini yang dielaborasi melalui cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, dan aktif (*active learning*) sebagai upaya transfer pembelajaran (*transfer of learning*), nilai (*transfer of value*) dan prinsip-prinsip (*transfer of principles*) demokrasi dan HAM yang merupakan prasyarat utama tumbuh kembangnya masyarakat madani (Hidayat dan Azra, 2008: 8-9).

Selain ketiga kompetensi tersebut, dalam mempelajari *Civic Education* dapat juga dilandasi dengan kemampuan tertentu untuk berpartisipasi atau kecakapan partisipatori (*participatory skill*), antara lain dapat dilakukan dengan:

- 1) Proaktif berinteraksi; kemampuan pokok yang harus dimiliki oleh warga negara dalam melakukan komunikasi dan bekerjasama dengan warga negara lainnya.
- 2) Kritis dan senantiasa memantau (memonitoring) isu publik; kecakapan memantau persoalan sosial politik dan pemerintahan mengacu kepada kemampuan warga negara untuk mengamati dan memahami penanganan persoalan yang terkait dengan proses politik dan pemerintahan.
- 3) Kemampuan mempengaruhi (*influencing*) kebijakan publik; mempengaruhi proses politik dan pemerintahan . Dengan adanya keseimbangan ini (*bargaining position*) antara keduanya dan di luarnya akan lebih mudah dibangun.

Menurut Nu'man Somantri dalam Nurmalina K dan Syaifullah, tanda-tanda dari gerakan Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain:

- 1) Para pelajar harus terlibat dengan bahan pelajaran
- 2) Kegiatan dasar manusia (*basic human activities*) melandasi bahan pelajaran
- 3) Bahan pelajaran *Civics* harus dikorelasikan atau diintegrasikan dengan bahan-bahan ilmu sosial, sains, teknologi, etika dan agama agar bahan *Civic Education* itu fungsional
- 4) Bahan pelajaran *Civic Education* harus dapat menumbuhkan berfikir kritis, analitis, kreatif agar para pelajar dapat melatih

diri dalam berfikir, bersikap, dan berbuat yang sesuai dengan perilaku demokratis. Dengan perkataan lain, para pelajar akan dilatih dalam menilai berbagai macam masalah sosial, ekonomi, politik secara cerdas dan penuh rasa tanggung jawab, agar propaganda serta agitasi politik yang tidak bernilai dapat dihindarkan (Nurmalina K dan Syaifullah, 2008: 69).

Dari uraian-uraian di atas, dapat dianalisis bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti sempit adalah *Civic*, yaitu berkaitan dengan masalah-masalah politik, sedangkan dalam arti luas adalah masalah moral, etika, serta aspek sosial ekonomi sebagaimana juga politik.

Hasil-hasil penelitian tentang pendidikan kewargaan di berbagai negara sesungguhnya menyimpulkan bahwa secara umum pendidikan kewargaan yang dilakukan di berbagai negara mengarahkan warga bangsa itu untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dianut bangsa bersangkutan.

Sesungguhnya banyak aliran filsafat yang dapat dijadikan pembenar bagi upaya pendidikan kewargaan (*civic education*). Namun, landasan filsafat tersebut kemudian perlu dicari relevansinya dengan kondisi dan tantangan kehidupan nyata dalam masyarakat tertentu, agar *civic education* (pendidikan kewargaan) mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pemecahan kemasyarakatan

yang sedang dan akan dihadapi suatu bangsa atau masyarakat. Oleh karenanya, apapun bentuk kewargaan yang dikembangkan di berbagai bangsa, nilai-nilai fundamental dari suatu masyarakat perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan sosial, agar nilai-nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan problem suatu masyarakat.

Dimanakah tempat *civic education*? Pendidikan Kewargaan harus ditempatkan di dalam dunia riil dan ideal sekaligus. Dimana proses pendidikan kewarganegaraan memperkenalkan seorang dengan dunia ideal, maka yang ideal itu bukan reifikasi tetapi sesuatu yang harus diuji di dalam konsep dalam tabakrannya dengan soal yang riil. Dengan begitu, ketuhanan tidak menjadi dan tidak boleh dijadikan “theokrasi” langsung atau tidak langsung, persatuan bukan darah akan tetapi kepercayaan publik.

Keadilan tidak bisa diuji dengan keadilan, tetapi harus diuji dengan berapa masyarakat paling malang mendapat perhatian dan berapa masyarakat paling beruntung dikendalikan dari keliaran konsumtif. Menempatkan nilai dalam suatu dunia riil berarti bahwa nilai itu menjadi rebutan masyarakat yang plural itu. Keadilan misalnya, ditempatkan dalam suatu ruang dimana kekuatan masyarakat yang berbagai jenis itu bisa bersaing untuk mengartikulasikan dirinya dalam keadilan itu. Dengan demikian,

mereka dapat melancarkan pengaruhnya terhadap negara dan politik (Cholisin, 2007: 26-27).

Dari penjabaran pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya mengembangkan paradigma barunya dalam pembelajaran yang demokratis, yakni orientasi pembelajaran yang menekankan pada upaya pemberdayaan siswa sebagai bagian warga negara secara demokratis. Dengan orientasi ini, diharapkan siswa tidak hanya sekedar mengetahui pengetahuan tentang kewarganegaraan tetapi juga mampu mempraktikkan pengetahuan yang mereka peroleh selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari.

Perlunya adanya kecakapan watak kewarganegaraan sebagai akibat dari proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, baik di lingkungan rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan. Kecakapan ini perlu dikembangkan karena dapat membangkitkan pemahaman bahwa demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari setiap individu. Wujud karakter privat seperti: tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap orang merupakan hak yang wajib. Karakter publik, seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi

merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses. Secara singkat, karakter privat dan publik dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Menjadi anggota masyarakat yang independent.
- 2) Memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.
- 3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
- 4) Berpartisipasi dalam urusan – urusan kewarganegaraan yang efektif dan bijaksana.
- 5) Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat (Ghofir.A dalam Prosiding, 2009: 234).

2. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi kewarganegaraan adalah pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan siswa yang mendukungnya menjadi warga Negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Branson (1998: 8-9) menegaskan tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut:

- a) Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu
- b) Pengembangan pengetahuan intelektual dan partisipatoris
- c) Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu

- d) Komitmen yang benar terhadap nilai fundamental demokrasi konstitusional

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*)

berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Pengetahuan kewarganegaraan merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemauan bersama dan hidup berdampingan secara damai dan masyarakat global.

Pendidikan kewarganegaraan memuat pengetahuan kewarganegaraan yang berbasis pada ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan menyajikan fakta, konsep, generalisasi dan teori-teori yang dikembangkan dari ilmu politik, hukum dan kewarganegaraan.

Kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah

kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan, berpikir kritis.

Dimensi *civic skills* ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari siswa, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran serta aktif warga negara. Untuk dapat berperan secara aktif tersebut diperlukan pengetahuan tentang konsep fundamental, sejarah, isu dan peristiwa aktual, dan fakta yang berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu secara kontekstual dan kecenderungan untuk bertindak sesuai watak dari warga negara (Quigley, Buchanan dan Bahmueller, 1991: 39).

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Quigley, Buchanan dan Bahmueller, (1991: 11) merumuskan *civic disposition* adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Secara konseptual, *civic disposition* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni: “*civility* (*respect*

and civil discourse), individual responsibility, self discipline, and civic mindedness, open mindedness (openness, scepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity, dan loyalty to the nation and its principles)”
(Quigley, Buchanan dan Bahmueller, 1991: 13-14).

Artinya kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi dan keragaman, kesabaran dan keajegan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Civic disposition atau watak kewarganegaraan sebagai akibat dari proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, baik di lingkungan rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan. Kecakapan ini perlu dikembangkan karena dapat membangkitkan pemahaman bahwa demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari setiap individu. Wujud karakter privat seperti: tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap orang merupakan hak yang wajib. Karakter publik, seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses. Secara singkat, karakter privat dan publik dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Menjadi anggota masyarakat yang independent.
- 2) Memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.
- 3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
- 4) Berpartisipasi dalam urusan – urusan kewarganegaraan yang efektif dan bijaksana.
- 5) Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat (Ghofir.A dalam Prosiding, 2009: 234).

C. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik

1) Sosialisasi Politik

Menurut Rush dan Althoff, sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Oleh karena itu, sosialisasi politik dalam beberapa hal merupakan konsep/kunci sosiologi politik, antara lain:

- a. Ketiga konsep lain mengenai partisipasi, perekrutan dan komunikasi erat berkaitan dengan sosialisasi politik. Partisipasi dan perekrutan merupakan variabel-variabel dependen yang parsial dari sosialisasi dan komunikasi, karena keduanya menyajikan elemen dinamis dalam sosialisasi.
- b. Sosialisasi politik memperlihatkan interaksi dan interdependensi perilaku sosial dan perilaku politik. Sebagai akibat wajar yang penting dari interaksi dan interdependensinya, ia menunjukkan interdependensi dari ilmu-ilmu sosial pada umumnya, sosiologi, dan ilmu politik pada khususnya (Rush & Althoff, 2007: 25-26).

Karena berkaitan dengan proses internalisasi nilai, proses pendidikan atau sosialisasi politik akan bergantung pada tatanan nilai yang

menjadi acuannya. Sherman, 1987: 16 (dalam Affandi, 2011: 31), melihat sosialisasi politik dalam tiga perspektif, yakni:

- a) Perspektif konsensus, yakni sosialisasi politik dipandang sebagai cara membentuk masyarakat dengan membentuk kepribadian-kepribadian demokratis yang akan menjadi pendukung demokrasi. Sebaliknya dari perspektif ini adalah perspektif konflik. Perspektif konflik yang melihat sosialisasi sebagai gambaran keinginan golongan atas yang kuat yang menguasai pendidikan dan media. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa masyarakat tidak dibentuk semata-mata oleh kepercayaan (juga perasaan) dari dalam saja, melainkan juga dipengaruhi oleh kekuatan dari luar, baik kultural maupun struktural.
- b) Perspektif konstruksi sosial, yakni sosialisasi politik mempunyai beberapa pengaruh, tetapi pengaruh itu lebih mengembangkan bayangan demokrasi daripada yang sesungguhnya. Perdebatan kalangan politisi dipandang kalangan pendukung perspektif ini sebagai bagian dari mesin pemerintahan sebagai usaha mempertahankan kedudukan melalui penciptaan kesadaran yang keliru (*false consciousness*) di kalangan masyarakat.
- c) Perspektif humanisme, yakni pandangan ekstrem dalam melihat perilaku manusia dipengaruhi baik oleh sosialisasi dan internalisasi maupun oleh kekuatan dalam dan luar. Pandangan humanisme menganggap bahwa individu mempunyai kapasitas inteligensi, kreativitas, analisis, dan imajinasi serta kemampuan untuk memahami tekanan dan menetapkan situasi serta mengubahnya dengan cara yang dianggap penting (Affandi, 2011: 31-32).

Menanggapi perspektif yang berlainan, Sherman, 1987:7 (dalam Affandi, 2011: 32) mengambil jalan tengah dengan beranggapan bahwa manusia secara kuat dipengaruhi oleh proses sosialisasi dan paksaan dari luar. Namun bagaimanapun tak diragukan lagi bahwa mereka mempunyai kapasitas untuk memilih di antara berbagai alternatif dan bahkan untuk mengubah keadaan di sekitarnya.

2) Pendidikan Kewarganegaraan Bagian dari Sosialisasi Politik

PKn sebagai Pendidikan Politik yang dilakukan di sekolah merupakan bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik

pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik yang ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada. Oleh karena itu, sosialisasi politik dalam beberapa hal merupakan konsep sosiologi politik.

Apabila ilmuwan-ilmuwan politik kurang sekali memperhatikan sosialisasi politik atau mereka terlalu menerima sebagaimana adanya, para antropolog, psikologi sosial, dan sosiolog sudah mengetahuinya sebagai konsep yang penting dan dari disiplin-disiplin ilmu inilah kemudian dapat disimpulkan tiga definisi awal mengenai sosialisasi, antara lain:

- 1) Pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu keterampilan- keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasi, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
- 2) Segenap proses dengan mana individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

- 3) Komunikasi dengan dan dipelajari dari manusia lainnya, dengan siapa individu itu secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum (Rush & Althoff, 2007: 25).

Dari beberapa definisi di atas dapat diketengahkan beberapa segi penting sosialisasi. Pertama, sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman, atau seperti yang dinyatakan oleh Aberle sebagai “pola-pola aksi”. Kedua, memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas-batas yang luas; dan lebih khusus lagi berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap. Ketiga, sosialisasi itu tidak perlu dibatasi sampai pada usia kanak-kanak dan masa remaja saja (sekalipun pada usia tersebut merupakan periode-periode yang paling penting dan berarti), akan tetapi sosialisasi itu tetap berlanjut sepanjang kehidupan. Selain itu, sosialisasi merupakan pra-kondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial (Rush & Althoff, 2007: 25-28).

Menurut Cholisin, cara belajar politik yang termasuk dalam tipe sosialisasi politik langsung antara lain:

- a) *Imitation* (meniru);

Belajar politik dengan metode meniru ini paling banyak dilakukan, baik oleh orang tua, muda, pandai, bodoh. Modal

dasarnya adalah adanya mobilisasi atau komunikasi, tanpa adanya kedua hal ini sulit untuk dilaksanakan. Contohnya, anak-anak pada umumnya memilih partai politik meniru pilihan orang tuanya.

b) *Anticipatory socialization* (sosialisasi antisipatori);

Metode belajar politik dengan metode ini pada dasarnya dengan cara menyiapkan diri tentang peranan politik yang diinginkan. Misalnya, orang tua, guru dapat mendefinisikan peranan warga negara yang baik, sehingga anak dapat mengantisipasi peran yang dituntut oleh sistem politik nasionalnya.

c) *Political education* (Pendidikan politik);

Dalam belajar politik dengan metode pendidikan politik bersifat dialogis, terbuka, rasional atau penyadaran. Di sekolah, lewat PKn arahnya yaitu pada menumbuhkan '*Good Citizenship*' atau agar anak menjadi efektif bagi bangsanya. Kegiatan yang dilakukan terutama terletak pada berpartisipasi memperoleh informasi-informasi politik, misalnya membaca buku-buku teks, mengikuti perkembangan lewat media massa elektronik dan non-elektronik, dll.

Pendidikan politik jelas berbeda dengan indoktrinasi politik, yang merupakan belajar politik yang bersifat monolog bukan dialog, lebih mengutamakan pembangkitan emosi, dan lebih merupakan pengarahan politik untuk dukungan kekuatan politik (mobilisasi politik) dari pada meningkatkan partisipasi politik. Indoktrinasi

politik ini pada umumnya dilakukan oleh rezim otoriter atau totaliter untuk mempertahankan status-quo, partai politik juga pada umumnya lebih banyak menggunakan indoktrinasi politik dari pada pendidikan politik.

d) *Political experience* (pengalaman politik);

Metode ini sering ditafsirkan secara tumpang tindih dengan konsep pendidikan politik pada pengalaman politik. Penekanannya pada orang yang sedang belajar politik (disosialisasikan) sedangkan pada pendidikan politik pada yang sedang mensosialisasikan (*socializer*). Pengalaman politik tidak mesti positif misalnya pengalaman yang pahit melakukan kontak dengan pejabat terlibat dalam pembuatan keputusan yang otoriter dapat menyebabkan partisipan menjadi frustrasi, bermusuhan dan mengasingkan diri dari proses politik (Cholisin, 2000: 6.2 - 6.8).

Dari bahasan mengenai sosialisasi politik di atas, jika dikaitkan dalam pembelajaran PKn dapat dilakukan dengan sosialisasi politik, terutama dalam penyampaian materi, penggunaan metode, dan penggunaan media pembelajaran PKn yang diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi proses pembelajaran PKn dalam lapangan.

Jika dikaitkan dengan pembelajaran PKn, proses pembelajaran PKn ini merupakan kategori sosialisasi politik secara langsung, karena dalam kegiatan belajar mengajar pembelajaran PKn

dapat secara langsung dan gamblang memperkenalkan kegiatan-kegiatan dan penyelesaian kasus-kasus politik yang real dan relevan sehingga siswa dapat dengan mudah mempelajari pembelajaran PKn tanpa harus menghafal teks dipahami dengan konsepsi yang benar, dapat disajikan dalam kegiatan belajar dengan benar, serta menarik. Guru juga dituntut untuk dapat menguasai materi yang terkandung dalam PKn. Kegiatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan, dalam hal ini peserta didik dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, sosialisasi politik juga memiliki tipe dalam pelaksanaannya, antara lain:

1) **Tipe sosialisasi politik tak langsung**

Dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori tipe sosialisasi politik tak langsung adalah sebagai berikut:

a) *Interpersonal transference* (pengalihan hubungan pribadi);

Menurut tipe ini, pengalaman hubungan sebagai anak dalam keluarga dan sebagai pelajar dalam sekolah, akan dikembangkan dalam hubungannya dengan figure penguasa. Maksudnya, ada kecenderungan yang bersifat tetap bahwa hubungan dengan penguasa merupakan pengulangan dari apa yang telah dilakukannya pada pengalaman pertama kali dalam kehidupannya. Misalnya, jika pada pengalaman pertama kali (dalam keluarga atau

sekolah) melakukan hubungan yang bersifat kooperatif, maka hal ini akan dilanjutkan pada waktu melakukan hubungan dengan penguasa. Ini berarti, kontak pertama anak dengan penguasa nonpolitik, khususnya orang tua akan menjadikan kesiapan dalam kontak dengan dunia politik dan figure penguasa.

b) *Apprenticeship* (magang);

Menurut tipe ini, aktivitas-aktivitas non politik dipandang sebagai praktek/magang untuk aktivitas politik. Contohnya, organisasi pembentuk pribadi seperti Pramuka, organisasi siswa, dll adalah bentuk yang penting dalam pembelajaran politik.

c) *Generalization*;

Menurut tipe ini, kepercayaan dasar dan pola-pola nilai budaya yang merupakan nilai umum (*general value*), bukan sebagai referensi ke arah obyek politik tertentu, biasanya memainkan peranan yang besar dalam menentukan struktur atau pola-pola budaya politik. Contohnya, pandangan mengenai sifat manusia hakekatnya baik, maka mudah menimbulkan sikap percaya atau berprasangka baik terhadap penguasa, atau tokoh politik.

2) Tipe sosialisasi politik langsung

Dapat dikatakan bentuk sosialisasi politik langsung apabila seseorang menerima / mempelajari nilai-nilai informasi, sikap, pandangan-pandangan, keyakinan- keyakinan mengenai politik secara eksplisit. Misalnya, individu secara eksplisit mempelajari budaya politik, sistem politik konstitusi, partai politik, dsb (Cholisin, 2000: 8).

Pola belajar politik atau sosialisasi politik menurut teori sistem diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan sistem politik ideal yang ingin dibangun bangsanya. Bagi bangsa Indonesia sistem politik ideal yang hendak dibangun adalah sistem politik demokrasi pancasila, maka arah sosialisasi politik adalah pada sistem politik ini (Cholisin. 2000: 6.3-6.4).

Sistem politik demokratis yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

PKn sebagai pendidikan politik di sekolah, maka konsekuensinya akan mengutamakan tipe sistem politik langsung. Isi sosialisasi mengutamakan orientasi politik yang bersifat eksplisit, yang kemudian diprogram sebagaimana yang

tercermin dalam kurikulum, pola belajar politik bersifat terbuka, rasional, dan arahnya untuk mewujudkan warga negara yang baik.

Dari penjelasan tentang tipe sosialisasi politik di atas, maka jelaslah bahwa pembelajaran PKn merupakan tipe sosialisasi politik langsung. Karena dalam penerapannya, pembelajaran PKn mengajarkan materi yang mencakup tentang hubungan antara negara dengan warga negara serta pengenalan berbagai aktivitas politik yang dilakukan oleh aktor politik. Pembelajaran PKn juga lebih bersifat interdisipliner (berbagai bidang; ekonomi, sosial, budaya, dll) dan lebih menekankan pada dialog dari pada monolog, karena dalam hal ini warga negara dituntut untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan dalam pembelajaran PKn melalui pendidikan politik. Adapun metode yang digunakan dalam menjelaskan materi pembelajaran yang berhubungan dengan pendidikan politik secara eksplisit/ langsung, antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan metode meniru, sosialisasi antisipatori, pendidikan politik, dan pengalaman politik. Sehingga, siswa dapat menganalisis kejadian yang dijelaskan mengenai politik/ pendidikan politik.

Metode belajar politik yang lain yang termasuk tipe sosialisasi politik langsung, seperti: imitasi, sosialisasi

antisipatori, dan pengalaman politik dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran politik melalui PKn. Begitu pula tipe sosialisasi politik tak langsung, seperti transfer interpersonal, magang dan generalisasi, dapat dimanfaatkan untuk menunjang PKn (Cholisin, 2000: 6).

Dari pembahasan mengenai hubungan sosialisasi dengan PKn, jelaslah akan dapat membantu perkembangan pendidikan politik, dalam hal ini mengembangkan budaya politik melalui pembelajaran politik di sekolah melalui PKn dengan metode imitasi, sosialisasi antisipatori, dan pengalaman politik di lapangan.

Di samping alasan ideologis dan rasional, pendidikan politik sering pula berbeda karena dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berlainan. Dari sudut ini, para pendukung pendidikan politik berasal dari kalangan yang berkepentingan untuk mempertahankan *status quo* sampai pada kelompok radikal yang kurang menyukai tatanan politik dan meyakini pendidikan politik dapat menghancurkan tatanan tersebut (Brownhill & Smart, 1989: 107).

Di sinilah terletak arti bahwa pendidikan politik bagi suatu sistem politik. Pendidikan politik tidak saja akan menentukan efektivitas sebuah sistem politik karena mampu melibatkan para warganya, tetapi juga dapat memberi corak pada kehidupan

bangsa di waktu yang akan datang melalui upaya meneruskan proses internalisasi nilai politik yang dianggap relevan pada orientasi pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dengan pandangan hidup bangsa.

3) **Budaya Politik**

Budaya politik yang hendak diwariskan adalah tentunya yang sesuai dengan sistem politik yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, sistem politik yang dicita-citakan (sistem politik ideal) adalah sistem politik demokrasi pancasila. Dalam sistem politik demokrasi pancasila, kedaulatan rakyat dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai dasar pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ini berarti tipe budaya politik partisipan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya politik pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang tepat ditransmisikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi sesudahnya. Nilai-nilai budaya politik pancasila diantaranya: 1) Religius (Bukan sekuler), 2) Bhineka Tunggal Ika (Pluralisme), 3) Wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan, 4) Ciri kekeluargaan, 5) Gotong royong, 6) Musyawarah, 7) Cinta kemerdekaan, 8) Cinta tanah air, 9) Cinta persatuan dan kesatuan, 10) Semangat solidaritas (Cholisin, 2008: 6).

Menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sistem politik demokrasi Pancasila dikembangkan atas prinsip fungsi-fungsi lembaga negara dilaksanakan secara terspesialisasi. Misalnya, fungsi

legislasi (membuat UU) merupakan fungsi spesialisasi legislatif, fungsi melaksanakan UU merupakan fungsi spesialisasi eksekutif, dan fungsi penghakiman/ penegakan UU merupakan fungsi spesialisasi yudikatif. Hal ini mengisyaratkan tipe sistem politik yang hendak dikembangkan menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tipe refracted (terpencar); yang merupakan tipe sistem politik modern.

Budaya politik menunjukkan ciri khas dari perilaku politik yang ditampilkan oleh individu yang terintegrasi dalam beberapa kelompok masyarakat ataupun suku bangsa. Oleh karena itu, budaya politik yang dimiliki pun berbeda-beda. Terdapat berbagai macam pengelompokan budaya politik, diantaranya: Budaya politik elit (terdiri kaum pelajar sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan) dan budaya politik massa (kurang memahami politik sehingga mudah terbawa arus). C. Greetz mengelompokkan budaya politik masyarakat Indonesia berdasarkan kriteria budaya politik priyayi, santri dan abangan. Sedangkan menurut Herbert Feith menyoroti sistem politik di Indonesia yang didominasi oleh budaya politik aristokrat jawa dan wiraswasta islam. Almond dan Verba mengidentifikasi macam-macam budaya politik ke dalam tipe-tipe budaya politik sebagai berikut:

1) **Budaya politik parokhial (*parochial political culture*)**

Budaya politik parokhial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas yaitu belum adanya spesialisasi tugas atau peran, sehingga para pelaku politik belum memiliki peranan yang khusus. Dengan kata lain, satu peranan dilakukan bersamaan dengan perannya dalam bidang kehidupan lainnya seperti dalam bidang ekonomi dan agama.

Dalam budaya politik ini, masyarakat tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik secara sepenuhnya. Adapaun yang menonjol dalam budaya politik ini adalah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kekuasaan politik di dalam masyarakat yang dipegang oleh kepala adat atau kepala suku. Selain sebagai pemimpin politik, kepala adat atau kepala suku berperan juga sebagai pemimpin agama, dan pemimpin sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam budaya politik parokhial tidak dijumpai spesialisasi tugas dan peran dalam kegiatan politik. Kalaupun mungkin ada, dalam intensitas atau kadar yang masih rendah, sehingga tingkat partisipasi politik masyarakatnya pun masih rendah.

2) **Budaya politik subjek (*subject political culture*)**

Dalam tipe budaya politik subjek, masyarakat atau individunya telah memiliki perhatian dan minat terhadap sistem politik. Hal ini diwujudkan dalam berbagai politik yang sesuai

dengan kedudukannya. Akan tetapi, peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat. Individu atau masyarakat hanya menerima aturan tersebut secara pasrah. Tidak ada keinginan atau hasrat untuk menilai, menelaah atau bahkan mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam budaya politik ini individu atau masyarakat berkedudukan sebagai kaula atau dalam istilah masyarakat Jawa disebut *kawula gusti*, artinya sebagai abdi / pengikut setia pemerintah/ raja yang posisinya cenderung pasif. Mereka menganggap bahwa dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau merubah sistem politik. Oleh karena itu, mereka menyerah atau turut saja kepada semua kebijaksanaan dan keputusan para pemegang kekuasaan dalam masyarakatnya.

3) **Budaya Politik Partisipan** (*participant political culture*)

Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik yang ideal. Dalam budaya politik ini individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang sangat luas. Ia mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (yang berupa pemberian tuntutan dan dukungan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (pelaksana, penilai, dan pengkritisi setiap kebijaksanaan dan keputusan politik pemerintah).

Kondisi yang diciptakan oleh budaya politik partisipan adalah kondisi masyarakat yang ideal dengan tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi apabila diupayakan secara optimal oleh segenap lapisan masyarakat dan pemerintah melalui berbagai kegiatan yang positif.

Daya kritis masyarakat sudah sepatutnya dibangun dan disempurnakan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daya kritis masyarakat yang sangat tinggi, akan menjadi alat control yang efektif terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan demikian, akan tercipta kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh terhadap aspirasi, keinginan, dan kepentingan masyarakat.

Pada kenyataannya, ketiga budaya politik sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat berdiri sendiri. Tipe budaya politik yang satu tidak dapat menggantikan tipe budaya politik lainnya. Almond dan Verba (1965) menyimpulkan bahwa budaya politik warga negara adalah budaya politik campuran yang di dalamnya banyak individu yang aktif dalam politik, tetapi banyak pula yang mengambil peranan sebagai subjek yang pasif.

Tipe budaya politik partisipan dalam sistem politik demokrasi pancasila, seperti digambarkan secara sederhana tersebut di atas, itulah yang disosialisasikan. Dengan demikian,

pentingnya sosialisasi politik dalam pengembangan budaya politik partisipan dalam sistem demokrasi pancasila dapat dinyatakan:

- 1) Sistem politik demokrasi pancasila dapat diwariskan (dipelihara) dan dikembangkan untuk mencegah kepunahannya.
- 2) Ketika terjadi pergantian generasi, maka generasi sesudahnya dapat melanjutkan dan menggerakkan dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan negara secara berkelanjutan.
- 3) Masalah pluralism dan adanya jaminan setiap orang/kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menguasai pemerintah, berpotensi menimbulkan konflik dapat diatasi. Karena dalam nilai budaya politik pancasila, seperti musyawarah, solidaritas, persatuan dan kesatuan yang disosialisasikan dapat menjadi acuan dalam mengelola konflik.

Menurut Almond, menggambarkan pentingnya sosialisasi politik bagi bangsa tampak pada:

- 1) Dapat membentuk dan mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa

- 2) Dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan jalan meneruskan dari generasi yang lebih tua kepada generasi berikutnya
- 3) Dapat mengubah budaya politik suatu bangsa (Cholisin, 2008: 6-8)

Suatu kebudayaan akan terus berkembang dan tidak akan musnah jika di dalam masyarakat terjadi proses penanaman nilai-nilai kebudayaan kepada setiap anggota masyarakat mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Penanaman nilai tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan setiap anggota masyarakat bahwa kebudayaan itu penting bagi kehidupan manusia. Sebagai salah satu subsistem dari kebudayaan, budaya politik dalam mempertahankan jati dirinya juga memerlukan suatu proses yang menekankan pada penanaman nilai-nilai politik kepada setiap anggota masyarakat. Budaya politik yang berkembang di masyarakat akan selalu berkaitan dengan kesadaran politik. Pada hakikatnya budaya politik merupakan cerminan dari kesadaran politik suatu masyarakat terhadap sistem politik yang sedang berlaku.

4) Partisipasi Politik

Pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, ilmiah, dalam proses

politik di dalam *civil society* (Budimansyah dan Winataputra, 2007: 190). Kecakapan-kecakapan tersebut jika menggunakan istilah dari Branson (1988:9) dapat dikategorikan sebagai *interacting*, *monitoring*, dan *influencing*. Interaksi berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Berinteraksi ialah tanggap terhadap warga negara lain, bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara damai dan jujur. Mengawasi (*monitoring*) berarti fungsi pengawasan warga negara terhadap sistem politik dan pemerintah. Mempengaruhi (*influencing*) mengisyaratkan pada kemampuan proses politik dan pemerintahan baik proses formal maupun informal dalam masyarakat. Kecakapan inilah yang diperlukan oleh pemilih pemula dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti yang diungkapkan oleh Khairon (1999: 14), yakni:

Di alam demokrasi sekarang ini warga negara tidak cukup mempunyai bangunan pengetahuan politik atau aspek-aspek politik, tetapi juga membutuhkan penguasaan terhadap kecakapan-kecakapan intelektual atau berpikir kritis, yakni: a) kemampuan mendengar, b) kemampuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan persoalan, c) kemampuan menganalisis, dan d) kemampuan untuk melakukan suatu evaluasi isu-isu publik; kecakapan partisipatoris mencakup: a) keahlian berinteraksi (*interacting*), b) kemampuan

memantau (*monitoring*) isu publik, c) keahlian mempengaruhi (*influencing*) kebijakan publik.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Setiap warga negara dituntut untuk berpartisipasi atau terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan bangsa dan negaranya. Partisipasi yang dapat diberikan bervariasi bentuknya seperti partisipasi secara fisik maupun secara non fisik. Tentu saja, partisipasi yang terbaik adalah partisipasi yang bersifat otonom, yakni partisipasi atau keterlibatan warga negara atau masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran dan kemauan diri. Ada tiga bentuk partisipasi menurut Koentjaraningrat, 1994 (dalam Nurmalina K dan Syaifullah, 2008), yaitu: (a) berbentuk tenaga, (b) berbentuk pikiran, dan (c) berbentuk materi (benda). Dalam partisipasi yang berbentuk

tenaga dimana warga negara terlibat atau ikut serta dalam berbagai kegiatan melalui tenaga yang dimilikinya, karenanya bentuk partisipasi ini disebut sebagai partisipasi secara fisik. Contohnya adalah ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Sementara itu, partisipasi dalam bentuk pikiran dilakukan melalui sumbangan ide, gagasan atau pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan untuk kebaikan bersama pula. Contohnya, adalah menyampaikan saran atau masukan kepada pemerintah baik secara lisan maupun tertulis melalui media tertentu (koran, majalah, televisi, maupun radio, dll) yang disampaikan dengan cara yang baik dan konstruktif. Sedangkan partisipasi dalam bentuk materi berhubungan dengan benda atau materi tertentu sebagai perwujudan dalam keikutsertaan warga negara tersebut. Contohnya, adalah memberikan sumbangan atau bantuan untuk dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, dan sebagainya (Nurmalina K dan Syaifullah, 2008: 35).

Partisipasi merupakan salah satu ciri warga negara yang baik. Tidak alasan bagi seorang warga negara untuk tidak berpartisipasi, karena partisipasi merupakan suatu keharusan bagi warga negara, sebagai pemilik kedaulatan. Tanpa adanya partisipasi warga masyarakat, maka kehidupan demokrasi akan terhambat dalam perkembangannya. Secara umum, partisipasi dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan warga negara

dalam proses bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan warga negara berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan (Wasistiono, 2003 dalam Nurmalina K dan Syaifullah, 2008), yaitu:

- 1) Ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan)
- 2) Ada keterlibatan secara emosional
- 3) Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Warga negara yang partisipatif adalah warga negara yang senantiasa melibatkan diri atau ikut serta dalam berbagai kegiatan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun keamanan. Jadi, lingkup partisipasi itu meliputi partisipasi politik, partisipasi sosial, partisipasi dalam bidang ekonomi, budaya, dan dalam bidang keamanan. Mengingat luasnya aspek-aspek yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap yang bersifat subjektif, diperlukan kesadaran (*consciousness*) dan komitmen (*commitment*) yang tinggi dari setiap diri warga negara (Nurmalina K & Syaifullah, 2008: 35-36).

Rush dan Althoff (1993) dalam Nurmalina K dan Syaifullah, 2008 yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai

keterlibatan atau keikutsertaan individu warga negara dalam sistem politik.

Huntington dan Nelson (1990) dalam (Nurmalina K dan Syaifullah, 2008) mengartikan partisipasi politik yang selanjutnya dikonsepsikan partisipasi politik yaitu kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Ada tiga hal yang terkandung dalam pengertian partisipasi politik tersebut, yaitu: pertama, partisipasi mencakup kegiatan-kegiatan yang objektif, akan tetapi tidak sikap-sikap politik yang subjektif. Kedua, yang dimaksud warga negara preman adalah warga negara sebagai perorangan-perorangan dalam berhadapan dengan masalah politik. Ketiga, kegiatan dalam partisipasi itu difokuskan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan sistem politik, yang mana disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing warga negara (Nurmalina K dan Syaifullah, 2008: 36).

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, menurut Milbrath (dalam Sastroadmodjo, 1995: 92-94), yaitu:

- 1) Sejauh mana orang menerima perangsang politik. Oleh karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.
- 2) Faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, sosial budaya hankamrata, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.
- 3) Karakteristik sosial seseorang. Karakteristik sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik.
- 4) Keadaan politik. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter.

Frekuensi dan kualitas seseorang yang semakin peka dan terbuka terhadap perangsang politik seperti kontak pribadi, organisasi, media massa, dapat memungkinkan seseorang untuk aktif dalam kegiatan politik. Kepribadian yang terbuka memungkinkan seseorang menerima informasi dan perangsang-perangsang politik dari orang lain dan lingkungannya.

Karakteristik sosial seperti status sosial, kelompok ras, etnis, usia, jenis kelamin, dan agama baik hidup di pedesaan ataupun di perkotaan, termasuk dalam organisasi sukarela akan mempengaruhi partisipasi warga negara. Walaupun demikian, semua itu dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan politik, seperti peraturan institusional dan nonkonstitusional dalam proses politik misalnya terwujud dalam sifat dan sistem partai dan lainnya (Sastroadmodjo, 1995: 15-16).

D. Konstruksi Sosial atas Pendidikan Politik

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*Social Construction of Reality*), menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul “*The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge*” (1996). Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

Asal mula konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme, yang dimulai dari gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini. Dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambatista Vico, seorang epistemolog dari Italia, ia adalah cikal bakal konstruktivisme dalam aliran filsafat,

gagasannya telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia dan sejak Plato menemukan akal budi dan ide. Gagasan tersebut lebih konkrit lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah informasi, relasi, individu, substansi, materi esensi dan sebagainya. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika dan dasar pengetahuan adalah fakta (Berger dan Luckman, 1990).

Descartes kemudian memperkenalkan ucapannya "*cogito, ergo sum*" atau "saya berfikir karena itu saya ada". Kata-kata Descartes yang terkenal itu menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini. Pada tahun 1710, Vico dalam "*De Antiquissima Italorum sapientia*", mengungkapkan filsafatnya dengan berkata "Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan". Ia menjelaskan "mengetahui" berarti "mengetahui bagaimana membuat sesuatu".

Hal ini berarti seseorang baru mengetahui sesuatu jika ia menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Menurut Vico, bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya Dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa Ia membuatnya. Sementara itu orang hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya.

Memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata atau real dan memiliki karakteristik yang spesifik. Institusi

masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama (Berger dan Luckman, 1990).

Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolik yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya. Pendek kata, terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Paradigma konstruksi sosial tumbuh berkat dorongan kaum interaksi simbolik. Paradigma ini memandang bahwa kehidupan sehari-hari terutama adalah kehidupan melalui dan dengan bahasa. Bahasa tidak hanya mampu membangun simbol-simbol yang diabstraksikan dan pengalaman sehari-hari, melainkan juga “mengembalikan” simbol-simbol itu dan menghadirkannya sebagai unsur yang obyektif dalam kehidupan sehari-hari.

Ada empat asumsi yang melekat pada pendekatan konstruksionis. Pertama, dunia ini tidaklah tampak nyata secara obyektif pada pengamat, tetapi diketahui melalui pengalaman yang umumnya

dipengaruhi oleh bahasa. Kedua, kategori linguistik yang dipergunakan untuk memahami realitas bersifat situasional, karena kategori itu muncul dari interaksi sosial dalam kelompok orang pada waktu dan tempat tertentu. Ketiga, bagaimana realitas tertentu dipahami pada waktu tertentu dan ditentukan oleh konvensi komunikasi yang berlaku pada waktu itu. Karena itu, stabilitas dan instabilitas pengetahuan banyak bergantung pada perubahan sosial ketimbang realitas obyektif di luar pengalaman. Keempat, pemahaman realitas yang terbentuk secara sosial membentuk banyak aspek kehidupan lain yang penting. Bagaimana kita berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari umumnya ditentukan oleh bagaimana kita memahami realitas.

Berdasarkan kenyataan sosial, unsur terpenting dalam konstruksi sosial adalah masyarakat, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma, baik itu norma adat, agama, moral dan lain-lain. Dan, semua itu nantinya akan terbentuk dalam sebuah struktur sosial yang besar atau institusi dan pertemuan. Struktur sosial atau institusi merupakan bentuk atau pola yang sudah mapan yang diikuti oleh kalangan luas di dalam masyarakat. Akibatnya institusi atau struktur sosial itu mungkin kelihatan mengkonfrontasikan individu sebagai suatu kenyataan obyektif dimana individu harus menyesuaikan dirinya.

Gambaran tentang hakikat kenyataan sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih dari pada jumlah individu yang membentuknya. Tambahan pula ada hubungan timbal-balik dimana mereka saling

berhubungan dan saling mempengaruhi. Tetapi seperti sudah dijelaskan diatas, masyarakat tidak pernah ada sebagai sesuatu benda obyektif terlepas dari anggota-anggotanya. Kenyataan itu terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal-balik (dialektika). Pendekatan ini mengusahakan keseimbangan antara pandangan nominalis (yang percaya hanya individu yang riil) dan pandangan realis atau teori organik (yang mengemukakan bahwa kenyataan sosial itu bersifat independent dari individu yang membentuknya).

Proses sosialisasi sangatlah bermacam-macam, mulai dari pertemuan sepintas lalu antara orang-orang asing di tempat-tempat umum sampai ke ikatan persahabatan yang lama dan intim atau hubungan keluarga. Tanpa memandang tingkat variasinya, proses sosialisasi ini mengubah suatu kumpulan individu saja menjadi suatu masyarakat (kelompok atau asosiasi). Pada tingkatan tertentu sejumlah individu terjalin melalui interaksi dan saling mempengaruhi.

Isi kehidupan sosial meliputi: “insting erotik, kepentingan obyektif, dorongan agama, tujuan membela dan menyerang, bermain, keuntungan, bantuan atau instruksi, dan tidak terhitung lainnya yang menyebabkan orang untuk hidup bersama dengan orang lainnya, untuk mempengaruhi orang lain dan untuk dipengaruhi oleh mereka. Tetapi berbagai tujuan dan maksud ini tidak bersifat sosial dalam dirinya sendiri. Budaya atau kultur, sebaliknya, mengacu pada aktivitas dan produk dari pemikiran reflektif, terlepas dari apakah itu berbentuk agama, seni, atau

ilmu pengetahuan (Berlin, 1999; Goethe, 1989; Rundell & Mennel, 1998: 12-14 (Ritzer & Smart, 2011: 23)).

Elias, 1996; Febvre, 1998 menyatakan bahwa masyarakat sipil mengacu pada bagian dari masyarakat yang terpisah dari negara yang di situ orang-orang terlibat dalam kehidupan komersial dan atau politik sebagai warga. Peradaban dan budaya, pada khususnya muncul sebagai dua pengertian yang terpisah, dan karena perbedaan bangsa, memiliki bobot, nilai, dan penekanan yang berbeda bagi berbagai aspek dalam kehidupan sosial modern (Ritzer & Smart, 2011: 23).

Dari penjelasan teori di atas, dapat dianalisa bahwa pendidikan politik merupakan peradaban dan budaya bagi warga negara sebagai aspek kehidupan sosial, dengan perluasan konsepsi masyarakatnya dalam menyajikan dan mengajukan pendapat-pendapat tentang makna pendidikan politik.

Secara epistemologis menurut Hobbes, 1968; dan Taylor, 1989: 159-176, pengetahuan tentang dunia sosial dan alami dikumpulkan dan dijelaskan melalui metodologi rasionalisme empirik. Pencarian akan analisis rasional mengenai masyarakat dimulai dengan fenomena tunggal yang bisa diamati yang dijumpai dalam sejarah dan kehidupan sosial. Sistem umum perilaku dan pengaturannya kemudian dibentuk secara induktif dari hasil pengamatan-pengamatan. Dengan kata lain, pandangan mekanistik dan atomistik mempengaruhi cara memahami hubungan politik dan sosial (Ritzer & Smart, 2011: 25).

Konstruktivisme sosial meneguhkan asumsi bahwa individu-individu selalu berusaha memahami dunia di mana mereka hidup dan bekerja. Mereka mengembangkan makna-makna subjektif atas pengalaman-pengalaman mereka, makna-makna yang diarahkan pada objek-objek atau benda-benda tertentu. Makna-makna ini pun cukup banyak dan beragam sehingga peneliti dituntut untuk lebih mencari kompleksitas pandangan-pandangan ketimbang mempersempit makna-makna menjadi sejumlah kategori dan gagasan (Creswell, 2010).

Dalam hal ini, pendidikan politik merupakan kajian kognitif yang berusaha ditelaah dan dianalisis dari beberapa pandangan menjadi suatu konsep pengetahuan. Konstruksi sosial atas pendidikan politik sebagai eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi makna pendidikan politik dari hasil sosialisasi politik. Pendidikan politik merupakan sosialisasi politik secara eksplisit yang dapat dilakukan oleh guru melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Konstruksi sosial atas pendidikan politik merupakan sebuah desain yang dibangun dalam suatu bingkai berkesadaran serta berkemampuan bukan saja sebatas mengerti apa yang divisualkan di level permukaan realitas. Lebih dari sekedar, namun menembus batas terdalam secara esensial untuk berkontribusi mengangkat penyingkapan realitas sebenarnya tentang pendidikan politik.

Eksistensi pendidikan politik sebagai sosialisasi politik sangat dibutuhkan dalam implementasi pembentukan siswa sebagai warga negara yang melek politik melalui komponen-komponen *civic knowledge*, *civic*

skills dan civic dispositions sebagai pradigma baru PKn. *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara yang berkaitan dengan hak-kewajiban/peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat Internasional.

Konstruksi sosial merupakan proses interaksi yang menghasilkan internalisasi dan eksternalisasi yang merupakan aspek dinamis dalam akibat yang saling membalas secara timbal-balik. Dengan menekankan dua proses ini, Simmel melihat aktor individu (atau kolektif) dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, Simmel melihat sang aktor sebagai 'pencipta' proses-proses sosiologi; kedua, sebagai penerima atau target akibat-akibat sosial yang muncul dari rentetan interaksi sebelumnya. Eksternalisasi mengacu pada proses produktivitas sosial, internalisasi mengacu pada elaborasi akibat sosial baru melalui pengalaman (Simmel, 1976: 64 (Ritzer & Smart, 2011: 134)).

Dalam kajian di atas konstruksi pada pendidikan politik merupakan proses interaksi yang dapat menghasilkan internalisasi (akibat dari sosial baru melalui pengalaman) dan eksternalisasi (proses

produktivitas sosial), karena pendidikan politik merupakan aspek yang dinamis, sehingga menghasilkan sebuah konstruksi realitas atas pendidikan politik.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa konstruksi sosial atas pendidikan politik merupakan pendekatan dimana terdapat bermacam-macam definisi pendidikan politik sesuai dengan fenomena yang terjadi pada interaksi antar masyarakat dan menghasilkan suatu konsep. Dalam pendidikan politik, diharapkan dapat terjadi sosialisasi politik yang baik sehingga menghasilkan konsep warga negara yang melek politik (pembatasan perilaku).

Dalam konstruksi sosial menggunakan perspektif fenomenologi, yakni perspektif yang modern tentang dunia manusia dan merupakan gerakan filsafat yang paling dekat hubungannya dengan abad ke-20. Asalusulnya seperti gerakan filsafat Barat dapat ditelusuri pada teks-teks kuno dan yang lebih signifikan, bersumber pada Skolatisisme abad pertengahan. Namun, penulis-penulis fenomenologi sendiri sendiri umumnya sudah puas mengambil tulisan-tulisan Edmund Husserl sebagai titik tolak mereka; dan Husserl sendiri berulang kali menunjukkan pemutusan hubungan radikal yang dilakukan Rene Descartes dengan filsafatisasi sebelumnya sebagai awal dari sebuah perspektif fenomenologis.

Husserl menyatakan penolakan Descartes terhadap semua otoritas filsafat sebelumnya sebagai perbuatan mendirikan fenomenologi modern. Determinasi Descartes untuk meragukan segala sesuatu dan hanya

menerima apa yang diperolehnya dengan menggunakan akal nya sendiri sebagai sesuatu yang pasti, bukanlah prinsip metodologis, tetapi (*in nuce*) muatan substantif dalam pandangan filsafat modern terhadap realitas. Husserl mengakui implikasi dalam metode keraguan sistematis Descartes itu adalah peninggian pengalaman sebagai pokok persoalan nyata (*the real subject matter*) sekaligus hakim terakhir atas kebenaran filsafat (Ritzer & Smart, 2011: 461).

Maka, dalam bentuknya yang paling umum, bagi pandangan modern, pengalaman adalah satu-satunya sumber pengetahuan, dan karena tidak serta-merta jelas, pengalaman juga merupakan kondisi yang menjadikan pengetahuan sebagai sesuatu yang perlu. Artinya, pengalaman tidak serta-merta menawarkan diri sebagai pedoman yang sudah pasti untuk dunia (termasuk diri kita sendiri) (Ritzer & Smart, 2011: 461).

Dalam kajian pendidikan politik, pengetahuan – pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, guru, dan pemerintah terhadap makna pendidikan politik bukan serta-merta merupakan pedoman untuk dijadikan patokan memaknai pendidikan politik, tetapi sebagai hasil interaksi sosialisasi politik. Bagaimana bentuk sosialisasi politik yang dilakukan oleh guru, dan bagaimana siswa dapat mengimplementasikan sosialisasi politik tersebut dalam bentuk kegiatan politik, seperti pemilu dll.

Maka, menurut Judovitz, 1988 dalam bentuknya yang paling umum, fenomenologi adalah ‘peralihan subjektif’ yang menjadi ciri semua pemikiran modern dan menyadarkan wawasan bahwa kesadaran manusia

terperangkap dalam sebuah sistem representasi-representasi referensial diri (*self-referential*) tiada akhir; bahwa kesadaran adalah sebuah sistem *tanda-tanda*. Namun, dengan gaya paradoks, modernitas – sebagai kedaulatan pengalaman – serta-merta membagi diri menjadi dunia subjek dan dunia objek. Dualisme antara subjek dan objek ini walaupun dualisme yang semuanya tergolong konseptualisasi subjektivitas yang lebih luas – bersifat fondasional bagi modernitas dan merupakan kerangka pikir tempat terbentuknya fenomenologi, dan yang hendak dihadapi dengan fenomenologi (Ritzer & Smart, 2011: 461).

Karena itu, dua tradisi utama dalam pemikiran modern berupaya memahami seluruh dunia pengalaman, dari sudut pandang objektivitas atau dari sudut pandang subjektivitas. Tradisi empiris objektif berusaha menjelaskan kesadaran sebagai alat cermin (yang agak tidak sempurna) tempat di dalamnya tercermin struktur nyata dunia objek-objek yang ada secara independen dan di luar sepengetahuan kita. Kesadaran di sini dipandang sebagai imajinasi akan sebuah dunia yang terpisah, juga asing, dari kehadiran diri kita secara langsung sebagai makhluk yang berperasaan (*sentient being*). Sebaliknya, tradisi idealis subjektif berusaha menafsirkan dunia dilihat dari daya ekspresif inheren kesadaran. Tradisi yang pertama terfokus pada masalah-masalah penyahihan pengetahuan, tradisi kedua pada isu-isu autentisitas perasaan, tetapi keduanya sama-sama berjuang keras menjembatani jurang yang sangat dalam antara realitas dan

penampakan; rekahan tempat terjadinya jurang itu ada di pusat pengalaman modern.

Pengalaman diri itu bebas dari segala otoritas eksternal, masing-masing dari kita membawa di dalam dirinya sendiri jaminan akan keberadaannya yang mutlak (Husserl, 1931: 143 (Dalam Ritzer & Smart, 2011: 462-463)). Dan dalam proses itu, semua konstruksi hipotesis dan teori ditolak demi memilih untuk kembali kepada kesadaran murni. Kepastian tidak terletak pada penampilan (konstruksi) dan realitas (hipotesis), tetapi ditentukan sebagai fenomena.

Selain itu, Schutz, 1962: 3 menyatakan bahwa tugas pertama dari pendekatan fenomenologis ini ialah memperoleh wawasan tentang karakter pengalaman sosial nyata yang diinterpretasikan konvensional. Dalam hal ini, Schutz menerangkan bahwa baik konsep ilmiah maupun pengalaman sehari-hari terbentuk lewat kategori-kategori yang terpisah dari segala sesuatu yang serta merta ditentukan dalam kesadaran (Ritzer & Smart, 2011: 482).

Pendekatan ini mendorong elektisisme metodologis yang juga menggunakan tulisan-tulisan Henri Bergson, dan khususnya William James. Dengan demikian, masuk akal bila Schutz dianggap tengah memperjuangkan sebuah sosiologi ‘subjektif’, artinya realitas sosial dibentuk di dalam dan melalui tindakan dan relasi bermakna. Tidak ada fakta kehidupan sosial yang benar-benar objektif sebab kehidupan sosial semata-mata terdiri dari perilaku yang diinterpretasikan. Hal ini membuat

karya Schutz semakin mirip (tetapi parsial dan sepihak) dengan karya Max Weber, yang terang-terangan diakuinya. Fenomenologi versi ini menetapkan diri sebagai kritik signifikan terhadap kecenderungan ilmiah dan positivistic dalam penelitian ilmu sosial Amerika (Ritzer & Smart, 2011: 482).

Pada tingkat yang lebih substantif dari wawasan fenomenologis tentang karakter kehidupan sosial, Schutz bisa dianggap banyak menggunakan fungsionalisme Amerika konvensional dari pada wawasan historis kritis Husserl terhadap modernitas. Masyarakat disini dianggap sebagai suatu kesatuan fungsional; suatu keseluruhan koheren dan teratur yang didasarkan pada kumpulan kepercayaan dan persepsi bersama, dan melalui kumpulan itulah 'realitas' didefinisikan sebagai milik bersama semua anggotanya. Namun, kesatuan konsensual kehidupan sosial bukan diekspresikan melalui kumpulan spesifik nilai-nilai dan tergantung pada nilai-nilai tersebut, tetapi dicirikan sebagai 'realitas sehari-hari' atau '*lifeworld*' bersama. Artinya, koherensi skala besar masyarakat muncul dan dilanggengkan lewat banyak asumsi 'diterima apa adanya oleh dunia'. Schutz mendefinisikan realitas tersebut dalam hubungan kognitif; sebagai suatu dunia pemikiran spesifik dan komunitas perseptual, tempat 'gudang pengetahuan' tertentu telah diinstitutionalisasi, khususnya lewat bahasa sehari-hari sebagai fondasi pengalaman tanpa berpikir (Ritzer & Smart, 2011: 483).

Demikian juga dengan pendidikan politik yang dikonstruksikan berdasarkan emosi-emosi atau perasaan dan pengalaman yang terjadi pada individu-individu secara idealis yang bermacam-macam, sehingga terjadilah kemajemukan persepsi/pengetahuan terhadap makna pendidikan politik yang tidak terbatas.

Oleh karena itu, tujuan awal fenomenologi sangat sederhana, yakni menjelaskan apa yang sudah tertentu (*what is given*), yang tampak bagi kesadaran, tanpa bersaha menjelaskannya dengan cara apapun dan tanpa menghubungkan signifikansi dan makna. Fenomenologi adalah aplikasi spesifik dari metode keraguan Descartes; hanya mencari yang menampilkan diri secara tertentu. Mengapa sulit sekali mengungkapkan hal yang sudah tertentu? Cara berfikir kita yang normal tidak bisa tidak akan melihat pernyataan seperti itu dengan rasa curiga. Bila sesuatu itu sudah ditentukan, maka harusnya sudah diketahui, bila sesuatu itu sudah diketahui, apakah sudah tentu sesuatu itu sudah ditentukan? Kontradiksi inilah yang menjadi sumber fenomenologi. Dengan memperjelas konsistensi esensialnya, fenomenologi menetapkan suatu orientasi orisinal dan khas terhadap realitas (Ritzer & Smart, 2011: 466).

Perspektif konstruksi sosial, yakni sosialisasi politik mempunyai beberapa pengaruh, tetapi pengaruh itu lebih mengembangkan bayangan demokrasi daripada yang sesungguhnya. Perdebatan kalangan politisi dipandang kalangan pendukung perspektif ini sebagai bagian dari mesin pemerintahan sebagai usaha mempertahankan kedudukan melalui

penciptaan kesadaran yang keliru (*false consciousness*) di kalangan masyarakat (Affandi, 2011: 31-32).

PKn sebagai pendidikan politik di sekolah, maka konsekuensinya akan mengutamakan tipe sistem politik langsung. Isi sosialisasi mengutamakan orientasi politik yang bersifat eksplisit, yang kemudian diprogram sebagaimana yang tercermin dalam kurikulum, pola belajar politik bersifat terbuka, rasional, dan arahnya untuk mewujudkan warga negara yang baik. Dalam hal ini adalah bagaimana memperjelas makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan politik sebagai sosialisasi politik bagi warga negara dengan tujuan menjadikan warga negara melek politik. Dunia politik realitasnya akan selalu lekat dalam dimensi kehidupan manusia. Perwujudannya akan selalu bisa ditemui dalam skala yang besar hingga skala yang terkecil. Tentu dengan tingkat variasi kajian yang berbeda antara satu dimensi dengan dimensi lain.

Sementara itu, dalam mengkonstruksikan pendidikan politik perlu pendefinisian yang sama dari beberapa pandangan untuk menciptakan suatu objektivitas makna pendidikan politik.

Tindakan sosial tidak cuma dianggap bermakna secara subjektif, dalam pengertian Max Weber tetapi dapat diinterpretasikan oleh sosiolog sebagai salah satu konsekuensi dari kesatuan fungsional masyarakat sebagai suatu keseluruhan; ketimbal-balikan tindakan akan menjamin komprehensif timbal-balik dalam tingkat tertentu. Bahkan, kesatuan ini

menjadi semakin nyata, sehingga sosiologi semakin mendekati akal sehat sehari-hari di *lifeworld* (Ritzer & Smart, 2011: 483).

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Yudha Pradana (2012:106), dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik terhadap Pembentukan *Political Literacy* Siswa” mengukur pengaruh kompetensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik terhadap pembentukan *political literacy* dalam beberapa analisa, yakni kontribusi kompetensi Kewarganegaraan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terhadap pengembangan kemampuan melek politik siswa merupakan suatu pengembangan dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk siswa yang tahu dan paham akan kehidupan berbangsa dan bernegaranya dimana siswa dibekali dengan pengetahuan sistem politik Indonesia dan diajarkan tentang bagaimana partisipasi seharusnya, serta dibekali dengan kebajikan-kebajikan tentang etika dan nilai-nilai dalam berpartisipasi politik baik. Pendapat ini didasarkan seperti yang dikemukakan Branson (1999) bahwa agar partisipasi lebih bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan memerlukan kompetensi seperti: pengetahuan dan pemahaman, kemampuan intelektual dan partisipatoris, karakter atau sikap mental tertentu, dan komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kewarganegaraan berpengaruh terhadap pembentukan melek politik siswa,

yakni bahwa kompetensi pengetahuan kewarganegaraan memiliki korelasi terhadap pembentukan kemampuan melek politik siswa yakni sebesar 0,68% dengan pengaruh sebesar 46,24%. Pembentukan melek politik melalui kompetensi kecakapan kewarganegaraan sebesar 39,16%. Sedangkan kompetensi watak kewarganegaraan memiliki pengaruh sebanyak 54,79% terhadap pembentukan melek politik siswa dengan korelasi sebesar 0,74%.

Dari kajian penelitian terdahulu di atas, sangatlah jelas bahwa posisi studi pendidikan politik sebagai sosialisasi politik pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk siswa yang melek politik. Hal ini memberikan konstruksi pada pendidikan politik bahwa salah satu fungsi pendidikan politik adalah membentuk siswa menjadi warga negara yang melek politik.

Berdasarkan hasil penelitian pada (Jurnal Acta Civicus Volume 5, Nomor 1, 2011) secara umum penelitian ini ditujukan untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil analisisnya, antara lain:

- a. Orientasi kognitif berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan pilukada Cianjur 2011. Dengan nilai korelasi sebesar 0,355. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi kognitif berkontribusi sebesar 12,6% terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan pilukada Cianjur 2011. Orientasi kognitif

yang mempengaruhi partisipasi politik adalah pengetahuan individu terhadap suatu sistem politik, termasuk pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

- b. Orientasi afektif berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan pemilu pada Cianjur 2011. Dengan nilai korelasi 0,334. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi afektif berkontribusi sebesar 11,1 terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan pemilu pada Cianjur 2011. Orientasi afektif yang mempengaruhi partisipasi politik adalah kecenderungan emosi dan perasaan terhadap sistem politik, peranannya, keberadaan para aktor, dan penampilannya.
- c. Orientasi evaluatif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan pemilu pada Cianjur 2011. Dengan nilai korelasi sebesar 0,273. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi evaluatif berkontribusi sebesar 7,4% terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan pemilu pada Cianjur 2011. Orientasi evaluatif yang mempengaruhi partisipasi politik adalah pertimbangan terhadap sistem politik menyangkut keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

d. Orientasi politik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan pemilu pada Cianjur 2011. Dalam realitas kehidupan, ketiga komponen orientasi politik (kognitif, afektif, dan evaluatif) ini tidak terpisah-pisah secara tegas. Dengan nilai korelasi sebesar 0,551. Dengan pengaruh yang cukup kuat ini menunjukkan bahwa orientasi politik berpengaruh sebesar 26,1% terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa SLTA dalam pelaksanaan pemilu pada Cianjur 2011. Adanya perbedaan tingkat pemahaman tentang perkembangan masyarakat pada setiap individu menyebabkan ketiga komponen tersebut saling berkaitan atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Untuk dapat membentuk suatu penilaian tentang seorang pemimpin, seorang warga negara harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Pengetahuannya itu sudah dipengaruhi oleh perasaannya sendiri sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Dalam disertasi Jazeri, Mohamad. 2010, *Penalaran dalam Debat Politik di TV* ini bertujuan untuk menjelaskan tiga masalah pokok, yakni (1) proposisi penalaran dalam debat politik di TV, (2) konstruksi penalaran dalam debat politik di TV, dan (3) strategi penalaran dalam debat politik di TV. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Karena penggunaan bahasa dalam debat politik juga penuh

dengan kepentingan, penggunaan analisis pesan politik Vedung dianggap cocok untuk mengungkap motivasi; niat, kalkulasi, dan pertimbangan yang mendasari lahirnya sebuah argumen dalam debat politik. Data penelitian ini adalah unit wacana lisan dalam debat politik yang mengandung (1) proposisi penalaran, (2) konstruksi penalaran, dan (3) strategi penalaran. Data-data tersebut diperoleh dari peristiwa komunikasi dalam debat politik di TV, yakni DEBAT PARTAI dan debat Capres-Cawapres 2009. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan model alir Miles dan Huberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan simpulan akhir.

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa pendirian dalam debat politik dinyatakan dalam proposisi yang beragam. Keragaman proposisi tersebut dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni proposisi kategorik, hipotetis, dan modalitas. Selain keragaman kategori, proposisi dalam debat politik juga beragam dalam isi sesuai dengan sikap institusi yang diwakilinya. Keragaman proposisi tersebut menunjukkan bahwa pendirian dalam debat politik lahir dari sudut pandang yang beragam sesuai logika dan kepentingan politik masing-masing peserta debat. Perbedaan sudut pandang yang digunakan menyebabkan perbedaan penilaian terhadap suatu masalah politik yang diperdebatkan. Perbedaan tersebut semakin besar jika dipengaruhi oleh kepentingan politik yang diperjuangkan oleh peserta debat.

Konstruksi penalaran dalam debat politik dapat dibedakan menjadi dua, yakni konstruksi penalaran yang sah dan konstruksi penalaran yang sesat. Konstruksi penalaran yang sah dinyatakan dalam argumen asosiatif dan disosiatif. Argumen asosiatif yang ditemukan meliputi quasi logis, analogi, generalisasi, kausalitas, dan koeksistensial, sedangkan argumen disosiatif meliputi disosiasi ideologi dan kebijakan. Dilihat dari elemen pembangunnya, konstruksi penalaran membentuk pola yang berbeda dari model Toulmin. Sementara itu, penalaran yang sesat terjadi dalam bentuk kesalahan bahasa dan kesalahan relevansi. Kesalahan bahasa terjadi karena penggunaan bahasa yang tidak tepat, sedangkan kesalahan relevansi terjadi karena tidak adanya hubungan antara anteseden dan konklusi. Selain itu, kesalahan relevansi juga terjadi karena peserta debat melakukan kekerasan verbal seperti menginterupsi, mengancam, menonjolkan diri, merendahkan lawan debat, dan mensabotase giliran tutur. Temuan ini menunjukkan bahwa *pertama*, kesahihan dan kesalahan konstruksi penalaran dalam debat politik lebih dipengaruhi oleh motivasi politik, bukan kebenaran logis. *Kedua*, kesalahan penalaran sering terjadi karena peserta debat memanfaatkannya sebagai strategi berdebat. *Ketiga*, kecenderungan penggunaan argumen palsu dan kekerasan verbal menunjukkan bahwa penalaran dalam debat politik tidak sekedar pertarungan logika melainkan juga pertarungan kepentingan.

Strategi penalaran dalam debat politik secara garis besar dapat dibedakan menjadi strategi afirmatif (mengiyakan) dan strategi negatif

(menolak). Strategi penalaran yang dilakukan peserta debat politik di TV dipengaruhi oleh sikap institusi yang diwakili terhadap masalah yang diperdebatkan. Hal ini menunjukkan bahwa penalaran dalam debat politik bersifat kompleks. Kompleksitas tersebut terjadi karena penalaran dalam debat politik dipengaruhi oleh dua kepentingan, yakni kepentingan rasionalitas agar argumen yang dibangun masuk akal dan kepentingan institusi yang diwakili agar tujuan politiknya tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penalaran dalam debat politik berada dalam dua kepentingan, yaitu kepentingan mengikuti logika formal agar argumen yang dibangun menjadi rasional dan kepentingan mengikuti tujuan politik agar tujuan-tujuan politik praktis dapat tercapai sehingga kesalahan penalaran sering terjadi bahkan digunakan sebagai strategi untuk memenangkan debat.

Dalam jurnal nasional, oleh Ahmad Nurullah, 2012 yang berjudul Pendidikan Politik untuk Rakyat menulis tentang *INDONESIAN Corruption Watch (ICW)* menganggap banyak partai politik (*parpol*) tak menjalankan pendidikan politik. Partai Golongan Karya (*Golkar*), Partai Persatuan Pembangunan (*PPP*) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*PDIP*), termasuk partai yang abai terhadap pendidikan politik.

Menurut Peneliti Korupsi Politik *ICW* Apung Widadi, pendidikan politik penting untuk pencerahan dan mendorong pencegahan korupsi politik. Pendidikan politik akan berimplikasi positif terhadap

dukungan masyarakat maupun para calon konstituen pada parpol pilihan mereka.

Fakta-fakta yang dipaparkan ICW di beberapa pemberitaan media menyimpulkan dengan nada pesimistis bahwa korupsi politik jelang Pemilu 2014 bisa diberantas. Penyebabnya, korupsi politik bisa ditimbulkan dari diri sendiri atau akibat adanya dorongan parpol kepada kadernya untuk melakukan pembiayaan Pemilu yang bisa saja terus terjadi di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk mengerem itu, negara harus melakukan pembatasan dan memperketat dana kampanye. Menurutnya, jika negara dan seluruh parpol konsisten mengusung agenda antikorupsi, Pemilu 2014 niscaya berjalan sesuai keinginan rakyat: bebas dari penggunaan uang rakyat.

Parpol belum melakukan pendidikan politik kepada kader maupun rakyat. Akibatnya, politik uang (*money politics*) mendominasi proses pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah (pilkada). Persoalan politik uang ini menjadi cermin begitu rendahnya pendidikan politik dari parpol.

Selama ini, pendidikan politik yang dilakukan parpol belum menyentuh kesadaran masyarakat, melainkan hanya menyentuh persoalan ideologi partai untuk kadernya. Saat ini, UU yang ada pun belum mengatur soal mekanisme audit penggunaan dana bantuan APBN kepada parpol dan mekanisme pengumuman hasil audit.

Beda dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berharap semua parpol memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya setiap saat, bukan saat pemilu saja. "Bagi manapun, partai politik harus mampu memberikan pendidikan politik. Jangan cuma saat pemilu. Kita harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda," kata Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, usai pelatihan pendidikan kewirausahaan bagi anak muda di STEKPI, Kali Bata, Jakarta Timur, Minggu (15/4/2012).

Tepat yang dikatakan Hatta Rajasa bahwa parpol mutlak harus memberikan pendidikan politik setiap saat, tidak hanya saat pemilihan umum. Jika parpol tidak melakukan hal itu, maka secara tidak langsung telah gagal menjalankan salah satu fungsi vital parpol. Keberhasilan pendidikan politik sebuah parpol sering hanya dilihat dari banyaknya partisipasi masyarakat yang mengikuti pemilu. Padahal, bukan banyaknya partisipasi masyarakat yang menjadi tolak ukur. Kecerdasan dan kesadaran masyarakat adalah yang utama.

Dede Darkam (2009:175), menganalisis peranan sosialisasi pemilu di komisi pemilu dan implikasinya terhadap pengembangan partisipasi politik warga negara dengan hasil analisisnya adalah:

- a. Peranan KPU Kabupaten dalam pelaksanaan Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah ini berperan sebagai pelaksana pemilu yang disesuaikan pada tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, akan lebih ideal lagi jika dalam

pelaksanaan *citizenship education* atau pendidikan kewarganegaraan ini dijadikan ruh atau motor penggerak dalam pelaksanaan pemilu tersebut.

- b. Mekanisme sosialisasi yang ditempuh oleh KPU Kabupaten dalam meningkatkan kemampuan pemilih dalam menentukan pilihan politik. Oleh karena mekanisme sosialisasi ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dalam jati diri kewarganegaraan, maka dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan atau *citizenship education* memiliki peranan yang strategis bagi Komisi Pemilihan Umum terutama dalam melakukan mekanisme sosialisasi yang bisa membangkitkan kemampuan pemilih dalam menentukan pilihan politik. Hal ini sejalan dengan pengembangan pendidikan kewarganegaraan.
- c. Sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik dan kompetensi kewarganegaraan, peran Komisi Pemilihan Umum dalam menumbuhkan warga negara yang ideal tersebut, erat kaitannya dengan peranan pendidikan kewarganegaraan atau *citizenship education* itu sendiri, dimana pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam pengembangan partisipasi politik warga negara dalam kompetensi kewarganegaraan, maka dalam hal ini ada peran-peran yang harus diambil oleh Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan pemberdayaan kemampuan warga negara dalam mengambil

keputusan-keputusan politik agar terwujud *education for citizenship*.

Rika Sartika (2009:173-175), dalam tesisnya menganalisis pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula yakni pengaruh pendidikan kewarganegaraan berpengaruh signifikan lemah terhadap pengembangan pengetahuan dan watak kewarganegaraan pemilih pemula, yang ditandai dengan tidak seimbangnya antara pengetahuan dan watak kewarganegaraan yang dihasilkan oleh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Selain itu, dihasilkan penelitian bahwa pengetahuan dan watak kewarganegaraan berpengaruh signifikan lemah terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula yang ditandai dengan kecakapan partisipatoris pemilih pemula yang dihasilkan didominasi oleh aspek watak kewarganegaraan dibandingkan aspek pengetahuan kewarganegaraan, sehingga pemilih pemula kurang memiliki pengetahuan dalam kecakapan partisipatoris.

Oleh sebab itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan serta pengetahuan dan watak kewarganegaraan bersama-sama berpengaruh signifikan lemah terhadap pengembangan kecakapan partisipatoris pemilih pemula, yang terlihat bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan belum dapat mengembangkan pengetahuan dan watak kewarganegaraan yang dapat mendukung kecakapan partisipatoris pemilih pemula, sehingga walaupun aspek kecakapan partisipatoris yang diteliti telah seimbang namun

dalam hal kecakapan yang membutuhkan kemampuan menganalisis yang terjadi di dalam pemilu masih rendah dikuasai oleh pemilih pemula.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dapat direkomendasikan bahwa posisi studi tentang pendidikan politik adalah kontribusi pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik sebagai sosialisasi politik di dalam membangun warga negara yang partisipatif. pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik terhadap pembentukan *political literacy* dalam beberapa analisa, yakni kontribusi kompetensi Kewarganegaraan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terhadap pengembangan kemampuan melek politik siswa merupakan suatu pengembangan dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk siswa yang tahu dan paham akan kehidupan berbangsa dan bernegaranya dimana siswa dibekali dengan pengetahuan sistem politik Indonesia dan diajarkan tentang bagaimana partisipasi seharusnya.